



MEMBANGUN KOMUNITAS
DALAM PENGEMBANGAN
+ MASYARAKAT +

Rika E. Nurhidayah, Wawan Herry Setyawan, Subhan Purwadinata, Trusti Dhiani Henartiwi,
Endah Marendah Ratnaningtyas, Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina, Muchtar,
Novi Puji Lestari, Agus Setyowidodo.

ISBN 978-623-99691-3-4 (PDF)



9 786239 969134

Rika E. Nurhidayah, Wawan Herry Setyawan, Subhan Purwadinata, Trusti Dhiani Henartiwi,
Endah Marendah Ratnaningtyas, Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina, Muchtar, Novi Puji
Lestari, Agus Setyowidodo.

Membangun Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat



Membangun Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat

Penulis:

Rika E. Nurhidayah, Wawan Herry Setyawan, Subhan Purwadinata, Trusti Dhiani Henartiwi, Endah Marendah Ratnaningtyas, Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina, Muchtar, Novi Puji Lestari, Agus Setyowidodo.

Editor:

Dr. Wawan Herry Setyawan, M.Pd.

Yusuf Efendi, S.Pd.I, M.A

ISBN: 978-623-99691-3-4

Cover Image: Freepik.com

This cover has been designed using resources from Freepik.com

Buy Online:

<https://gaptek.id/>

Diterbitkan oleh

PT. Gaptek Media Pustaka

www.gaptek.id

Alamat: Jl. A. W. Syahrani No.47 Samarinda 75124,

Email: admin@gaptek.id

Cetakan pertama, Juni 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penulis.

KATA PENGANTAR

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan.

Hadirnya komunitas yang positif pada program pengembangan masyarakat pada dasarnya akan mampu memberikan kontribusi dalam proses pengembangan masyarakat lewat proses difusi inovasi menggunakan teknologi moderen. Oleh sebab itu pengembangan masyarakat seringkali disamakan dengan istilah modernisasi. Salah satu indikator modernisasi adalah hadirnya teknologi informasi komunikasi yang sangat cepat perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tidak jarang pada akhirnya teknologi informasi dan komunikasi tidak mampu menempatkan manusia sebagai subjek, namun justru menjadi objek teknologi. Ketidakberdayaan individu manusia ketika berhadapan dengan teknologi komunikasi merupakan gambaran dari gagalnya proses pembangunan dan perubahan sosial.

Buku ini terdiri dari 9 Bab yang meliputi berbagai aspek terkait Membangun Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya. Sebagai sebuah karya, tentu saja buku ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena ini kritik dan saran dapat disampaikan kepada penerbit sebagai bahan masukan dan perbaikan buku ini ke depannya.

Kediri, Maret 2022

Editor

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan Rika Nurhidayah	1
BAB 2 Perubahan dalam Komunitas Wawan Herry Setyawan	13
BAB 3 Pengembangan Masyarakat Subhan Purwadinata	23
BAB 4 Model Pengembangan Masyarakat Trusti Dhiani Henartiwi	35
BAB 5 Tantangan Dalam Pengembangan Masyarakat Endah Marendah Ratnaningtyas	47
BAB 6 Kedudukan Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina	59
BAB 7 Kendala dalam pengembangan komunitas masyarakat Muchtar	74
BAB 8 Peran Pendamping Desa Dalam Pengembangan Masyarakat Novi Puji Lestari	86
BAB 9 Perspektif Pengembangan Masyarakat Agus Setyowidodo	96

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Komunitas dalam Konteks Historis

Terminologi komunitas identik dengan masyarakat. Sebelum memahami arti komunitas yang sesungguhnya, kita harus memahami tentang masyarakat secara sederhana. Parwoto (2017) mendefinisikan bahwa masyarakat adalah suatu istilah yang mempunyai arti luas mencakup tata cara hidup antar manusia, manusianya sebagai warga masyarakat, sampai dengan kelembagaan/sistem hubungan antar manusia atau antar kelompok.

Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang memiliki arti kesamaan lalu diturunkan menjadi *communis* yang memiliki arti sama. Sebuah komunitas biasanya identik dengan hal-hal yang merupakan kesamaan yang akan menjadi identitasnya. Misalnya komunitas ibu-ibu sosialita, komunitas pengajian, komunitas penderita autisme dan lain-lain. Ada satu atau lebih kesamaan yang seakan-akan mengikat para anggotanya. Oleh karena itu komunitas dapat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah nyata yang memiliki ikatan bersama (*common bound*) yang menjadi identitas dalam komunitas tersebut.

Selain itu dalam sebuah komunitas juga terdapat partisipasi dan saling berbagi (*sharing*). Terbentuknya komunitas karena memiliki kepentingan yang sama atau disebut dengan *community of interest* (Rustandi and Hanifah, 2020). Sebuah komunitas dapat dimaknai juga dengan berkumpulnya orang-orang ditempat yang sama, tujuan yang sama serta kepentingan sosial yang sama (Minar and Greer, 2017). Tanpa disadari muncul dalam komunitas tersebut muncul ikatan emosional.

Secara tradisional komunitas didefinisikan sebagai sekelompok orang yang kohesif secara sosial yang berinteraksi satu sama lain atau mengatur diri mereka sendiri disekitar nilai, tujuan atau wilayah geografis yang sama (Madara, 2019). Namun di dalam dunia kontemporer, definisi komunitas telah melampaui batas fisik yang sekarang diidentikkan dengan hubungan timbal balik diantara orang-orang di seluruh dunia. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunitas dapat menumbuhkan rasa memiliki, minat serta identitas bersama.

Komunitas sudah menjadi bagian besar dalam kehidupan manusia, akan tetapi memiliki banyak makna, tergantung pada orang dan konteks yang dibicarakan (Lukito, Lidiawati and Matahari, 2018). Komunitas juga dimaknai sebagai kelompok orang yang saling memberikan dukungan dan setiap anggotanya yang dapat bergantung satu sama lain selama dapat mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan sebuah komunitas.

B. Komunitas dalam Perspektif Sosiologi

Komunitas (*community*) secara perspektif sosiolog adalah warga setempat yang bisa dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh

tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*) (Nasdian, 2014).

Aktivitas komunitas dicirikan dengan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, dimana semua usaha merupakan swadaya masyarakat dikaitkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif yang sifat swadaya, dan gotong royong, sehingga proses pembangunan berjalan efektif.

Sebuah komunitas pasti memiliki lokalitas atau tempat tinggal (wilayah) tertentu. Komunitas yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggal. Secara garis besar, komunitas berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu (Nasdian, 2014).

Pendapat lain mengatakan bahwa komunitas dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi (Sutrisno *et al.*, 2020). Beberapa analisis sosiologi menyoroti bahwa komunitas mungkin tidak memiliki definisi tunggal tetapi berkisar pada gagasan sosialisasi, mutualisme dan keberadaan kolektif (Madara, 2019).

Faktor Pembentuk Komunitas

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang bergabung dengan sebuah kelompok merupakan baik itu karena sebuah alasan yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan sebuah pilihan.

Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan.

a. Kedekatan

Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

b. Kesamaan

Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelegensi, atau

karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga.

Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Sebuah komunitas terdiri dari individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas sebagai suatu wilayah kehidupan sosial ditandai oleh suatu derajat setempat atau lokalitas dan perasaan yang sama.

Bungin (2008) menerjemahkan komunitas atau *community* sebagai masyarakat yang hidup bersama. Komunitas merupakan masyarakat yang telah hidup dan telah bekerja cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Hubungan yang cukup lama di antara mereka, kemudian dapat melahirkan manusia-manusia baru yang saling berhubungan. Hubungan tersebut juga akan melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian, dan sebagainya. Kemudian dari hubungan tersebut akan menghasilkan sistem-sistem seperti komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan mereka, sehingga memunculkan kebudayaan yang mengikat satu sama lain.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan, sebuah komunitas memiliki kesamaan terkait dengan komunitasnya tersebut. Selain itu, terdapat interaksi sosial di antara mereka, yang mana interaksi tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu. Artinya, interaksi di antara anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan interaksi di luar batas-batas tersebut. Lokalitas yang dimaksud oleh Soekanto sebagai dasar dari komunitas atau masyarakat setempat adalah tempat tinggal atau wilayah tertentu.

Meskipun dalam sebuah masyarakat yang individunya sebagian besar adalah perantau, tentunya ada saat-saat tertentu ketika mereka berkumpul, sebagai contoh adalah ketika akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional. Masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang tetap atau permanen, biasanya memiliki ikatan yang kuat karena faktor demografis tersebut.

Mengikuti perkembangan masyarakat modern saat ini, ikatan atau kedekatan karena faktor kesatuan tempat tinggal, sekarang mulai dirasakan berkurang sebagai akibat dari perkembangan teknologi, sarana dan prasarana transportasi atau perhubungan. Sebaliknya, kondisi tersebut semakin memperluas wilayah pengaruh ikatan masyarakat setempat. Masyarakat setempat atau komunitas berfungsi sebagai ikatan untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial yang terjadi karena faktor demografis.

Faktor kesamaan tempat tinggal tidak cukup untuk mengidentifikasi suatu komunitas. Selain itu, harus ada perasaan yang muncul di antara anggota-anggotanya yang membuat mereka saling membutuhkan. Rasa yang muncul misalnya karena merasa sesama perantau sepenanggungan sehingga saling memerlukan. Dari uraian tentang pengertian komunitas di atas, penulis menggambarkan bahwa interaksi sosial dalam sebuah komunitas atau suatu kelompok sosial tertentu dilandasi atas kesamaan dan kebersamaan individu-individu di dalamnya.

Kesamaan yang dimiliki oleh setiap individu berhubungan dengan komunitasnya bisa mencakup aspek psikologis maupun aspek lainnya. Kebersamaan yang muncul berhubungan dengan adanya kehidupan bersama yang dijalani maupun telah dijalani dalam kurun waktu yang cukup lama, yang melibatkan interaksi antar individu di dalamnya. Kebersamaan yang dibangun dianggap sebagai suatu tali persaudaraan serta kekeluargaan antara sesama anggota dengan anggota yang lainnya. Kumpul-kumpul setiap hari atau pada saat ada agenda. Komunitas sepeda, komunitas motor gede (moge) merupakan contoh dari sekumpulan orang yang memiliki minat dan ikatan emosional.

Sebagai sebuah perkumpulan yang bersifat positif, komunitas ini merupakan kumpulan orang atau individu yang memiliki minat yang sama, sehingga yang ikatan emosional antar sesama anggota komunitas muncul. Mereka bersatu karena memiliki kesamaan hobi dan tujuan sehingga membentuk identitas tersendiri. Karakter identitas komunitas biasanya mereka tunjukkan pada masyarakat melalui atribut-atribut tertentu seperti kaos, topi, rompi atau barang-barang lain yang menjadi identitas komunitas atau pernak-pernik kecil yang bisa dipakai setiap saat seperti gantungan kunci, stiker, pin dan bentuk lainnya.

Tergabungnya mereka dalam komunitas kemudian melahirkan ide-ide kreatif tentang kegiatan-kegiatan dalam mengisi keseharian para anggota. Contoh untuk komunitas sepeda motor, mereka melakukan kegiatan yang bekerja sama dengan kepolisian yang sifatnya bermanfaat seperti mengajak masyarakat untuk menerapkan *safety riding* dan *smart riding* di jalan guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berkendara dan berlalu lintas. Selain itu banyak juga komunitas yang melakukan kegiatan sosial seperti memberi santunan.

Secara sosiologi tentang *community and cities incompatible* dalam *cities and communities* memiliki beberapa karakteristik berikut ini:

1. *Common situation*, yaitu anggota komunitas yang hidup bersama dan akan berbagi banyak hal yang dapat mengikat bersama. Alasan kebersamaan bisa berdasarkan tempat tinggal, status sosial, etnis, agama dan lainnya.
2. *Common activities*, yaitu anggota komunitas yang memiliki kesamaan dalam hubungan, ketertarikan pada hal-hal yang sama, contohnya dalam membahas politik, melakukan olahraga, kegiatan pengajian, dan lainnya yang membuat mereka saling bertemu karena aktifitas yang dilakukan bersama.
3. *Collective action* yaitu, kepentingan bersama dari setiap anggota komunitas untuk mencapai suatu aksi yang mengikat kebersamaan untuk memperbaiki kepentingan bersama. Contohnya aksi solidaritas Sinabung saat gunung Sinabung meletus, atau aksi kemanusiaan lainnya seperti peduli bajir Pasaman.
4. *Shared identity* maksudnya berbagi identitas. Komunitas ini cenderung bersifat emosional contohnya identitas bendera merah putih untuk bangsa Indonesia. Atau logo pita hitam sebagai makna berkabung.

Komunitas yang berkebang di kota-kota besar sedikit berbeda dengan komunitas yang berkembang di pedesaan. Komunitas di kota besar lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material dan rasional bukan lagi menggunakan nilai "*relation oriented*" dalam

kebersamaan. Hal ini sejalan dengan banyaknya dan bervariasinya tuntutan dalam bertindak laku dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang berorientasi pada tujuan dan pencapaian target maka gaya hidup masyarakat kota lebih diarahkan pada penampilan fisik dan kualitas fisik sehingga tampak lebih berkelas kesan yang dimunculkan.

Pembentukan komunitas dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing anggota. Kemudian ditentukan siapa ketua dalam komunitas tersebut dan tim yang akan bekerja atau dianggap dapat bersinergi dengan ketua. Sementara Misriati (2016) menjelaskan langkah-langkah proses pembentukan tim yang diawali dengan pembentukan kelompok. Proses selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini seperti persepsi, motivasi, tujuan, organisasi independensi dan interaksi. Kemudian dilihat dari mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan kelompok yaitu:

a. Adaptasi

Proses adaptasi berjalan dengan baik apabila setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Setiap kelompok selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan dinamika kelompok dan setiap anggota menerima kelenturan ide, pandangan, norma dan kepercayaan.

b. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan dari setiap anggota adalah mampu untuk menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan, membina dan memperluas pola terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan dan kemampuannya.

c. Kedekatan (*proximity*)

Pengaruh tingkat kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, ada kecenderungan mereka mereka lebih sering bertemu, berbicara dan bersosialisasi. Kedekatan fisik dapat meningkatkan peluang interaksi dan membentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial jadi kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

d. Kesamaan (*similarity*)

Kesamaan yang ada diantara anggota komunitas sudah menjadi kebiasaan atau bahkan suatu keharusan. Orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intejensi atau karakter-karakter personal lain.

Manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi persyaratan menurut Soerjono Soekanto, (Rena, 2017) sebagai berikut :

- Setiap anggota kelompok harus menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.

- Terbentuknya hubungan timbal balik diantara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.
- Memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi politik dan lain-lain.
- Berstruktur, berkaidah dan memiliki kesamaan pola perilaku.

Sedangkan Ardianto et al., (2013) menyatakan bahwa terbentuknya komunitas dikarenakan ada beberapa faktor pendukung, antara lain :

- a. Penggunaan media sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi sekaligus dapat menjadi media untuk perekrutan anggota.
- b. Interaksi dan sosialisasi diantara pelakunya hal ini dapat menjadi indikator bagi keberlangsungan aktivitas dan keberadaan kelompok.
- c. Meningkatnya kepedulian terhadap hidup sehat. Kondisi ini dapat menjadi bagian dari manfaat kelompok yang bersifat positif.
- d. Meningkatnya keperluan menyeimbangkan antara hobi dan pekerjaan. Sebagian anggota sebuah komunitas merupakan pekerja yang masih aktif, sehingga kemampuan untuk mampu mengatur waktu antara tuntutan kewajiban yang berasal dari pekerjaan dan tuntutan kebersamaan dan komunitas.

Sedangkan Menurut McMillan dan Chavis dalam Madara (2019) menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi faktor pembentuk hadirnya komunitas, yaitu keanggotaan, pengaruh, integrasi, dan pemenuhan kebutuhan dan hubungan emosional bersama (Karyoto, 2020).

C. Tujuan Terbentuknya Komunitas

Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan sosial di antara warga masyarakat. Jumlah komunitas di masyarakat sangat banyak dan beragam. Komunitas dibangun atas dasar kesepakatan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh komunitas tersebut, seperti: komunitas petani, komunitas pecinta lingkungan, komunitas pengusaha muda, komunitas seni dan budaya, orang tua dengan anak autis dan lain-lain. Keberadaan sebuah komunitas berdasarkan pada interaksi antar anggota masyarakat yang muncul dari kepercayaan umum di masyarakat untuk saling bekerjasama satu sama lain, baik dalam komunitas yang paling kecil maupun komunitas yang lebih besar (Syafar, 2017).

Tujuan dibentuknya suatu komunitas adalah untuk dapat saling membantu antar anggota dalam menghasilkan sesuatu. Sedangkan manfaat komunitas secara umum bagi para anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana informasi mengenai kegemaran tertentu, yang mana penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui suatu komunitas. Misalnya komunitas pecinta musik klasik akan dengan sangat mudah membagikan dan mendapatkan informasi didalam komunitas tersebut.

2. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan, yaitu melalui komunitas maka hubungan atau ikatan antar sesama anggota bisa lebih kuat dan berkualitas.

Misalnya komunitas PUJAKESUMA yang merupakan singkatan dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Komunitas ini merupakan salah satu komunitas orang-orang dengan suku Jawa yang sudah turun temurun lahir di pulau Sumatera.

3. Sebagai sarana atau media untuk saling mendukung antar sesama anggota, sebab dengan adanya kesamaan minat pada bidang tertentu akan membuat setiap anggota komunitas bisa saling memberikan dukungan.
4. Misalnya komunitas orang tua dengan anak autis atau orang tua dari anak-anak penderita talasemia yang tergabung dalam Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia (POPTI). Komunitas ini lahir karena rasa memiliki penderitaan yang sama. Mereka akan berdiskusi dan saling menguatkan, bahkan mungkin dengan cepat mendapat donor darah saat anaknya harus melakukan transfuse darah secara rutin.

D. Jenis – Jenis Komunitas

Telah dipaparkan di atas, bahwa komunitas yang berkembang di masyarakat sangat beragam. Untuk menentukan jenis-jenis komunitas yang ada, dapat menggunakan kriteria yang saling terkait, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah atau daerah, kekayaan dan kepadatan penduduk, dan organisasi komunitas yang bersangkutan. Kriteria tersebut, dapat digunakan untuk membedakan antara beragam komunitas yang sederhana dan modern. Kedua komunitas dibedakan berdasarkan besar kecilnya organisasi, sedikit atau banyaknya masalah atau hal-hal yang harus dikelola, serta banyak dan sedikitnya jumlah anggotanya.

Komunitas dikatakan sederhana apabila dibandingkan dengan masyarakat yang sudah kompleks, terlihat kecil, organisasinya sederhana, sedangkan penduduknya tersebar. Kecilnya masyarakat dan belum berkembangnya masyarakat-masyarakat tadi disebabkan perkembangan teknologi yang lambat (Nasdian, 2014). Masih menurut Nasdian yang mengungkapkan bahwa dalam masyarakat modern, sering membagginya menjadi komunitas pedesaan (*rural community*) dan komunitas perkotaan (*urban community*). Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat sederhana, karena dalam komunitas modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti memiliki pengaruh dari kota. Sedangkan Madara (2019) menyatakan bahwa komunitas dikategorikan dalam komunitas lokasi seperti lingkungan, desa atau kota, serta komunitas berbasis organisasi.

Sumber lain mengkategorikan secara luas, bahwa komunitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Komunitas berdasarkan Minat

Komunitas jenis ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Umumnya komunitas yang terbentuk didasari dengan minat sama. Jumlah anggotanya akan besar karena komunitas tersebut biasanya mendukung minat atau sejalan dengan hobi mereka. Contohnya komunitas motor gede (moge), komunitas pecinta lingkungan, komunitas sepeda dan masih banyak lagi. Melalui media sosial yang terus berkembang dan mudah, maka komunitas ini semakin besar dan ada di setiap daerah.



Gambar komunitas sepeda, sumber <https://metrum.co.id/>

2. Komunitas berdasarkan Komuni

Komunitas ini umumnya terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan bersama. Landasan dari terbentuknya komunitas ini adalah kepentingan untuk seluruh anggota didalam organisasi sosial kepada masyarakat. Contohnya komunitas Seribu Dinar yang fokus hanya pada kegiatan sosial. Komunitas lainnya adalah komunitas ojek online. Rasa yang muncul karena persamaan kepentingan sebagai pencari nafkah maka solidaritas sesama mereka juga sangat tinggi.



Gambar komunitas Ojek Online, Sumber

<https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja>

3. Komunitas berdasarkan Lokasi

Komunitas jenis ini terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Umumnya komunitas ini tercipta karena ada keinginan untuk berinteraksi jangka panjang dalam membantu perkembangan lingkungan. Alasan lain karena ingin menjaga budaya saat sama-sama menjadi perantau (Hastuti, 2021). Contoh komunitasnya adalah PUJAKESUMA, PWS (Paguyuban Warga Sunda), IPM (Ikatan Perantau Minang) dan lainnya. Meskipun mereka berada di perantauan mereka tetap berusaha melestarikan budaya, bahasa dan ke khasan dari setiap daerah. Sehingga tidak pernah merasa sendirian, karena dalam komunitas ini juga mereka bisa menemukan aneka kuliner yang dapat mengobati rasa rindu pada kampung halaman.



Gambar Pelantikan PWS, Sumber <https://sumut.antaranews.com/>

Daftar Pustaka

- Ardianto, E., Soehadi, A. W. and Yulianto, E. (2013) *Consumunity Marketing*. Prasetiya Mulya.
- Hastuti, S. W. M., & Setyawan, W. (2021). Community Service in Study Potential Technology of Education Tour and Business Prospects of Traders in Tulungagung. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–144. <http://www.uniflor.ac.id/e-journal/index.php/mahajana/article/view/952>
- Karyoto, N., Sisbiantoro, D., Setyawan, W. H., & Huda, M. (2020). Effectiveness Legal Formal of Education Culture Heritage at Van Den Bosch Fort in Indonesian. *B-SPACE 2019: Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia*, 434.
- Lukito, A. C., Lidiawati, K. R. and Matahari, D. (2018) ‘Sense of Community Dan Self-Efficacy Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Komunitas Kesenian’, *Jurnal Psikologi TALENTA*, 4(1), p. 9. doi: [10.26858/talenta.v4i1.6431](https://doi.org/10.26858/talenta.v4i1.6431).
- Madara, D. (2019) *The Concept of Community and Sense of Belonging*. GRIN Verlag.
- Minar, D. W. and Greer, S. A. (2017) *The Concept of Community: Readings With Interpretations*. Routledge.
- Misriati (2016) ‘Faktor-Faktor Mempengaruhi Remaja Mengikuti Komunitas Musik Metal Dunia Kami Dunia Hitam Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.’, 3(1), pp. 1–16.
- Nasdian, F. T. (2014) *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Parwoto, I. (2017) ‘Dasar Pembangunan Bertumpu pada Komunitas’, in *Modul Dasar Pembangunan Bertumpu pada Komunitas*, pp. 1–27.
- Rena, E. (2017) ‘Komunitas K-Popers Pekanbaru (Studi Tentang Pembentukan Kelompok Sosial) Eriska’, 4(2), pp. 1–9.
- Rustandi, R. and Hanifah, H. (2020) ‘Dinamika Dakwah Komunitas Remaja Islam di Kecamatan Pangalengan’, *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19(2), pp. 199–224. doi: [10.15575/anida.v19i2.7540](https://doi.org/10.15575/anida.v19i2.7540).
- Setyawan, W. H., & Dewi, E. N. (2022). Parental involvement and Educational facilities on Student’s achievement through learning motivation as moderator variable, Is it Effective?. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v6i1.1565>
- Sutrisno, A. et al. (2020) *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Syafar, M. (2017) ‘MODAL SOSIAL KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL’, *Lembaran Masyarakat :Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), pp. 1–22.

Biodata Penulis

Dr. Rika Nurhidayah, S.Kp. M.Pd merupakan dosen di Fakultas Keperawatan USU departemen Keperawatan Dasar. Menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan di Universitas Padjadjaran, Bandung dan menyelesaikan program magister dan doktor di Universitas Negeri Medan

BAB 2

Perubahan dalam Komunitas

A. Dinamika sosial dalam perubahan komunitas

1. Konsep Konsep dan Analisa Group

Grup dalam komunitas yang kedua lebih kepada konsep-konsep dan alat analisis nya di sini nanti mulai dari pengorganisasian sejumlah orang definisi grup, syarat pembentukan grup, penggolongan grup, struktur dan kohesi grup, dinamika grup dan pada bagian 3 adalah a refleksi tentu berkaitan dengan fenomena nomor 1 dan konsep-konsep dan analisis isu pokok bahasan 2 yaitu syarat pembentukan group.

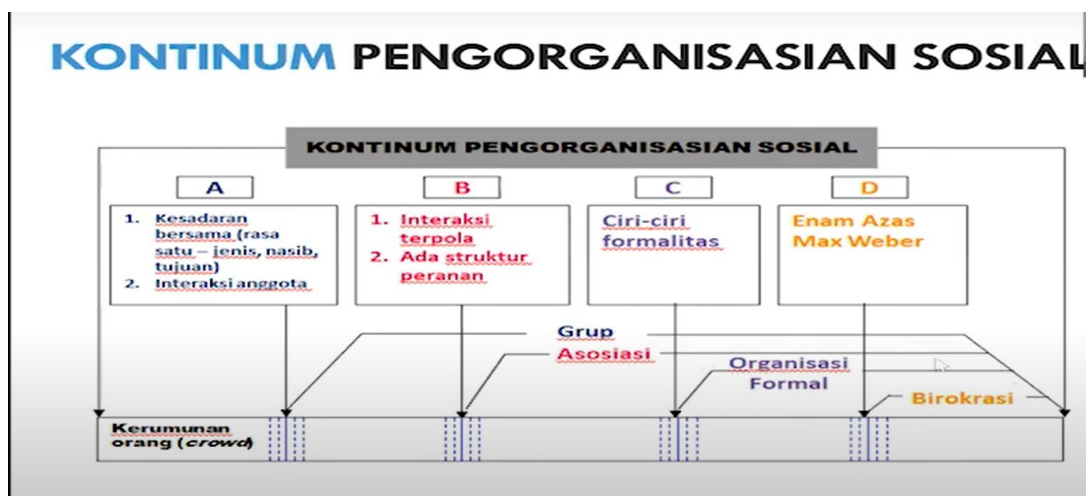
Kelompok adalah sekelompok orang atau beberapa individu yang mempengaruhi perilaku seseorang serta memberikan nilai serta standar terhadap perilaku seseorang (Pramudi, 2015). Kita akan mulai bahas satu persatu namun sebelumnya ada studi kasus sederhana yang bisa kita analisa terkait kelompok di sekeliling kita berdasarkan persepsi teman-teman. Kita sudah berusaha menyampaikan pada poin nomor 1 yaitu definisi, sebenarnya ya nanti masih bisa kita diskusikan sebagai contoh kasus tentang grup musik dari Surabaya. Pada konsep-konsep dan analisis grup ini nanti ada 5 hal yang akan kita sampaikan. Pertama, konsep dan definisi Group. Pada kaitan dengan sub pokok bahasan pertama di sini, fenomena grup dalam komunitas kita contohkan itu menunjukkan fenomena grup dalam komunitas kita misalnya tadi tentang Dewa 19. Bagaimana grup itu terbentuk, Bagaimana grup itu berubah, ada proses keluar masuk anggota dan sebagainya sampai akhirnya misalnya bubar. Demikian juga keluarga ada dinamika politik yang membuat masyarakat itu menjadi tersegregasi yang satu ke grup cebong yang satu ke grup kampret. Pada studi kasus ini menyingkapinya, kemudian bagaimana juga tadi ada geng motor seperti itu dan nanti kita akan membahas nya itu pun sebenarnya masih tentang fenomena group.

Fenomenanya seperti ini kami akan paparkan pengorganisasi yang ingin disampaikan di sini. Pada kesempatan ini saya ingin memastikan contoh grup di sekeliling kita ada banyak sekali kelas sosiologi, atau group matakuliah kelas lain, begitu juga ada banyak mata kuliah di kampus, sederhananya ada banyak orang di luaran sana tapi mengapa kita yang disini Mengapa saya dan saudara sekalian dan juga semua peserta mata kuliah yang ada di ruangan ini sekarang. Padahal di luaran sana banyak orang karena tidak memiliki kesadaran bersama dengan kita, mereka tidak ada rasa satu jenis satu nasib satu tujuan dengan kita mungkin ada kelas sosiologi yang lain tapi ya dalam konteks pengorganisasian proses belajar di dalam kampus dibagi juga menjadi kelas-kelas ketika ada kelas kelas 4 kita ini, maka saya dosennya dari saudara sekalian lebih kurang 90 orang sebagai peserta.

Padahal di luaran sana banyak sekali yang namanya jadi ketika dari sejumlah kerumunan atau kelompok group ini memiliki ciri-ciri, inilah yang kita sebut dengan grup. Ketika ciri-ciri B yang terpenuhi inilah nanti yang kita sebut dengan asosiasi ya ketika sekelompok orang tersebut memiliki ciri-ciri C ciri-ciri formalitas ini ada 4 nanti ciri formalitas tujuan. Hal seperti itu

menunjukkan bahwa itu sudah terorganisir secara formal disebut dengan organisasi formal. Terdapat empat ciri formalitas dari Spinner kemudian ketika sekelompok orang tadi semakin terorganisir dan memenuhi 6 azas Max Weber ada ini mulai dari pembagian kerja menurut aturan jenjang karir menurut aturan sampai gaji, menurut aturan Inilah yang disebut dengan birokrasi yang akan kita bahas hari ini lebih pada di grup setelah sesi ini nanti adalah organisasi dan birokrasi (Weber, 2003).

Dengan demikian grup itu adalah pengorganisasian sosial ini menunjukkan suatu konflik yang sekelompok orang dapat diidentifikasi sebagai anggota grup kecil dan informal seperti grup sampai kelompok formal yang sangat kompleks seperti birokrasi tadi ini kemudian perlu dibedakan dengan kerumunan atau kumpulan orang agregat dari henslin (2007) atau crowd publik dari Soekanto nanti itu jadi sehingga berbeda berbeda dari kerumunan kalau begitu Apa itu grup-grup adalah dua orang atau lebih manusia yang saling berinteraksi memiliki karakteristik sama dan memiliki rasa kebersamaan secara kolektif perhatikan tadi kesadaran bersama Rasa satu jenis satu nasib satu tujuan dan diantara anggota ada interaksi. Maka hanya kita yang dalam satu grup WA kelas-kelas lain yang punya grup sendiri inilah berdasarkan definisi itu grup dapat mencakup grup jadi setidaknya 2 orang sampai komunitas dan masyarakat luas masyarakat atau komunitas dapat juga dilihat sebagai orang-orang yang berinteraksi antara satu dengan yang lain memiliki kesamaan utamanya dalam batasan budaya dan teritorial dan memiliki aturan dan peraturan yang harus dipatuhi bersama.



Perkembangan keanggotaan grup individu dalam beragam grup perhatikan awalnya itu semua adalah individu tapi kita individu di dalam apa di dalam keluarga kita semua individu dan awalnya sekali grup kita yang penting dan paling utama itu adalah keluarga. Ketika teman teman atau anda punya teman sepermainan ya artinya anda punya grup sepermainan. Ketika anda sekolah, anda punya grup sekolah, ketika anda kuliah anda punya grup kuliah, ketika anda nanti bekerja Anda adalah punya grup sekerja dan bagaimanapun kita sebagai individu termasuk sebagai keluarga kita menjadi bagian dari komunitas (Syafar, 2017). Kita hidup menjadi bagian dari masyarakat, masyarakat ini pun luas sekali dan kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia pada akhirnya menjadi bagian dari masyarakat dunia.



Pada grup kita menyadari dan harus memiliki kesadaran menjadi bagian kelompok karena kita sadar menjadi bagian kelompok kelas kuliah misalnya maka kita menjadi satu grup ada hubungan timbal balik ada satu faktor yang dimiliki bersama adalah yang mencapai tujuan pembelajaran antara dosen yang mengajar mahasiswanya belajar dan pada akhirnya saling belajar karena apa prinsip belajarnya adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Prasetya, 2014). Seperti kita sampaikan berstruktur berkaidah sebagai contoh saat ini saya dosen ada mahasiswa saudara ilhamda, kita suatu saat nanti menjadi teman kita mungkin jadi atasan, kita yang bersistem dan berproses artinya kalau ada grup kuliah tapi tidak pernah kuliah atau ada grup belajar tapi tidak pernah belajar itu namanya bukan bersistem dan berproses lagi. Sehingga dapat disimpulkan ada syarat kelangsungan grup dan tampak atau tidak tampak atau eksplisit maupun implisit. Pada Bahasan ini bisa kita identifikasi bahwa semuanya ini ada beberapa hal kesadaran menjadi bagian kelompok grup Dewa 19 itu tidak akan terbentuk kalau mereka tidak punya kesadaran tidak ada hubungan timbal balik, tidak ada faktor yang dimiliki bersama. Bila mana ada struktur harus ada yang menggerakkan walaupun ini ya diangkat ketua misalnya seperti itu atau inisiator itu, kemudian bersistem berproses mereka akan berlatih di grup Noah dicontohkan di sini kalau mereka tidak pernah berlatih tidak ada aturan di dalam sistem mereka tidak pernah berlatih, langsung tampil ya tentu kurang kurang maksimal penampilan mereka atau tidak baik seperti itu. Nah itulah saudara sekalian Ini penting ini 5 syarat kelangsungan grup ini ya jelas atau tidak ada di dalam bahasan itu 5 hal ini sebenarnya ada nanti kalau ada melihat grup keluarga.

Coba identifikasi syarat kelangsungan grup ini ada dasar pembentukan grup ini nanti sambil refleksikan teman-teman. membenarkan pernyataan bahwa Apakah ini keturunan nenek moyang? Apakah benar tempat tinggal bersama, berdekatan. **Pertama**, keturunan nenek moyang atau genealogis, ini biasanya grup-grup kerabat satu keluarga ada hubungan darah genealogis biasa ini contoh masyarakat yang mengenal Marga walaupun tidak mengenal marga yang pasti keturunan nenek moyang. Ya kakek nenek pokoknya vertikal dia itu se keturunan nenek moyang ada

hubungan darah intinya itu. **Kedua**, tempat tinggal berdekatan, Kenapa disebut ini kalau dilengkapi ini misalnya arisan RT 5 Mengapa disebut arisan RT 5 arisan rukun rumah tangga yang tinggal di RT 5 artinya apa tempat tinggalnya berdekatan, contoh lain kelompok tani Desa misalnya seperti itu anggotanya ya masyarakat di desa tempat tinggal, kelompok pemakai Air Misalnya gitu seperti Subak di Bali tempat tinggal mereka berdekatan.

Sambil teman-teman refleksikan tadi bagaimana grup-grup tadi itu tentu ada atau tidak ya tujuan khusus mereka. **Ketiga**, Tujuan Khusus. Berkeluarga yang musik, yang politik, yang gamenya, seperti itu dengan melihat kalimat di bawah ini dapat kita katakan ada kemudian program-program pihak atas atau kebijakan caranya kelompok tani atau koperasi atau karang taruna seperti itu. Kenapa disebut kebijakan atau program ketika itu ia ibaratnya top-down suatu desa wajib ada kelompok tani kata pak camat, seperti itu atau kata pak bupati atau kata presiden dari pusat misalnya seperti itu. Maka di setiap desa di seluruh Indonesia ada kelompokkan setiap desa harus ada karang taruna.

Contoh pembagian kelas di ITB, misalkan dalam suatu program memberi kebijakan harus dibagi 20 kelas dan mewajibkan tinggal di asrama itu karena ini adalah program pihak pimpinan kampus. Maka disimpulkan intinya kelompok tidak mutlak hanya atas dasar salah satu faktor saja meskipun mereka satu kerabat, mereka satu tempat tinggal, dan program tersebut berasal dari kebijakan yang sifatnya top-down. Syarat harus memiliki tujuan khusus sebagai syarat kelangsungan grupnya. Group hanya melihat kesadaran menjadi bagian kelompok hubungan timbal balik, berstruktur, berproses, nyaman, merasa diri menjadi bagian dari kelompok, merasa ada referensi, ada yang ingin di dicapai bersama grup yang dianggap sebagai panutannya reference group misalnya dan ada tujuan khusus, serta ada kepentingan bersama (Setyawan, 2022). Sehingga Sekali lagi saya menekankan ini penting anda ketahui tidak mutlak hanya atas dasar salah satu faktor saja melainkan suatu grup dapat juga dibentuk lebih dari satu faktor sekaligus kerabat.

Jadi kalau menerjemahkan inti pembentukan grup adalah memiliki tujuan bersama Territory ada tujuan khusus kelompok. Sifat keanggotaan grup pertama terencana umumnya grup sekunder ini terencana, kemudian tidak terencana umumnya grup primer itu sesuatu yang pokok artinya relatif mudah masuk dan keluar. Pada umumnya grup dengan syarat sederhana dapat di contohkan kita dengan mudah membuat grup belajar sosiologi. Pada prakteknya siapa saja dapat masuk group bagi yang mau ikuti link yan dibuat yaitu link khusus untuk belajar sosiologi. Namun ada juga group yang tertutup seleksinya, umumnya grup dengan syarat mengikat contohnya grup grup band. Pada grup band Dewa19 tadi sudah jelas-jelas itu tertutup dengan aturan tertentu tidak sembarangan oarang dapat masuk group tersebut. Walaupun ada yang keluar masuk group namun dengan seleksi yang ketat. Sangat berbeda dengan yang tadi anda buatkan 1 link tertentu untuk belajar sosiologi banyak orang dapat bergabung tanpa syarat tertentu. Demikian juga dengan group terencana dan tidak terencana anda menjadi bagian dari mahasiswa suatu kampus tertentu, Anda menjadi bagian dari kelas matakuliah pun anda menjadi bagian dari grup-grup yang lain dan saling hubungan. Berbeda dengan yang tidak terprogram dan tidak terencana misalkan anda punya grup sendiri dengan si B anda punya grup sendiri dengan si C seperti itu namanya grup primer tidak terencana kemudian penggolongan.

B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kohesivitas Komunitas

Penggolong 4 empat hal harus diperhatikan berdasarkan tipe yang mempengaruhi kohesivitas komunitas. Sehingga teman-teman itu bisa mendefinisikan tidak hanya berdasarkan tipe hubungan boleh berdasarkan perasaan tadi di grup dan diluar group misalnya seperti grup musik.

a. Group dalam group (Ukuran).

Hal tersebut jelas misalnya pada grup pemain sepak bola kesebelasan dari Indonesia harus loyal. bilmana tidak ada perasaan *ingroup* bisa ada kemungkinan bola dimasukkan ke gawang sendiri. Pada politik di grup terdapat sosok atau tokoh di grup itu yang menjadi panutan menjadi referensi itu lebih pada politik. Mereka setelah di dalam grup itu mereka jadikan grup dalam grup, Iya dasar penggolongannya grup-grup dengan alasan tersendiri.

Begitu halnya sekarang ini sudah mulai ada pengumuman UMPTN status seseorang diterima di kampus tertentu. Mereka diterima di situ dan lagi sudah ada undangan dari kampus atau dari perguruan tinggi nya, namanya membership group secara otomatis nanti di tahun ajaran berikutnya tentu mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Ketika pengalaman Anda seperti itu dinyatakan diterima di kampus tertentu menjadi membership Group Apalagi sudah sudah beres semua administrasinya bahkan sudah diberi kartu mahasiswa secara otomatis perasaan dan pengaruh saudara harus bedakan sehingga akan terbentuk grup baru di dalam grup besar sebagai contoh akan terbentuk wa grup berlanju grup W group yang lain dala jaringan sosial.

b. Group Primer group sekunder (Karakter Sosial)

Tanpa berencana grup primer itu tidak apa-apa seperti itu Anda misalnya pada akhirnya memilih kuliah di tempat lain mungkin nggak masalah buat anda. Tapi ketika anda sudah menjadi bagian dari itu menjadi sesuatu yang primer buat pengakuan formalnya. Sesungguhnya tipe hubungan grup itu ada yang primer ada yang benar-benar pokok penting ada yang lebih longgar seperti itu contoh Kalau Anda misalnya mas Rahadian bagi Mas rahadianto sosok ibu itu adalah sesuatu yang primer pokok gitu seperti kuliah ini tentu lebih sekunder seperti itu bahkan bisa misalnya izin hari ini Anda tidak mengisi daftar hadir anda tidak hadir. Tapi kalau sudah berbicara orang tua Ibu primer sesuatu yang pokok di luar itu diluar sesuatu yang pokok ini bisa lebih longgar gitu Mas rahadianto tidak ketemu saya hari ini tidak terlalu masalah tapi dia tidak ketemu Ibu hari ini hal itu bisa-bisa sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu. Itulah yang membedakan primer dan sekunder. Contoh primer dalam lingkup keluarga tanpa pamrih menolong Ibu atau sebaliknya, itu tanpa pamrih menolong anak itu tanpa pamrih nggak ada itung-itungan menolong keluarga idealnya tanpa pamrih, beda dengan menolong teman teman apalagi teman jauh disana seperti itu bukan kategori sahabat itu kalau Uang sudah waktunya bayar atau mengembalikan tapi belum mana boleh begitu gitu tapi kalau sama ibu sama saudara itu hampir tidak bisa itu sama anak apalagi dari contoh ini tidak hanya keluarga contoh ini saudara-saudara kita yang dari luar daerah mereka

tinggal di kota yang sama mereka begitu juga apa tanpa pamrih. Mereka bukan keluarga sehubungan darah tidak hanya karena satu daerah hanya karena satu profesi pekerjaan mereka sama mereka guyub gitu apa-apa tanpa itung-itungan tapi ada juga yang itung-itungan itu yang itung-itungan itu disebut pamrih atau kemudian yang terakhir tapi informal itu pendidikan di keluarga itu pendidikan di keluarga kita ikuti saat ini seperti itu namanya juga informal itu di dalam keluarga.

Ketika anda termasuk pertemanan seperti itu tapi ketika anda formal ya biasanya ini grup-grup sekunder yang anda ikuti dengan aturan-aturan ini itu. Stringer (2009) memberi contoh keluarga teman sepermainan tetangga kelompok pengajian ibu-ibu ini primer dengan sekunder ukurannya relatif besar, seperti foto bersama dosen-dosen dalam sebuah lokakarya tidak saling kenal bisa sama sekali tidak saling kenal secara formal dan interpersonal, umumnya karena kesamaan kegiatan ada 1 lokakarya atau seminar tertentu kita masuk kesitu itu juga pada murid-murid satu sekolah, pegawai sekantor, kumpulan alumni ITB itu contoh grup sekunder ya seperti itu kemudian ini tadi grup pengelompokan berdasarkan perasaan kebersamaan umumnya dalam komunitas pada kelompok-kelompok untuk mencapai kepentingan bersama.

c. Reward dan Punishment (Efektifitas Komunikasi)

Pada grup masyarakat yang lebih luas tentu di sini ada reward dan punishment. Kemudian untuk membedakan *in group* dan *out group* seperti dicontohkan sepakbola tapi lebih pada fans club seperti itu sudah jadi *out group* bedakan dengan grup ada tokoh, ada teman, ada tokoh budaya, tokoh agama, bahkan orang tua adalah idola bisa jadi idola atau bisa yang anda kagumi.

Nah kalau yang membership tadi ini tadi contoh 10 bulan lalu anda diumumkan diterima menjadi anggota resmi suatu grup tertentu dalam hal ini contoh yang tokoh politik tadi itu, kemudian jaringan sosial, ini sudah lebih mudah buat anda ini ya Wa grup tadi. Demikian juga apa kalau dalam teori jaringan itu ya Ada simpul-simpul pada ikatan-ikatan sederhananya berapa nama di phonebook handphone anda itu itu jadi jaringan anda.

Pada struktur dan kohesi grup, struktur menggambarkan hubungan antar pelaku. Supaya lebih mudah, anda belajar sosiologi itu minimal 2 orang individu dan individu maka setidaknya ada status di antara mereka ada peran siapa berstatus apa, selanjutnya dia berperan apa, dan proses yang menyertainya bisa dekat bisa Jauh. sebelum memahami kohesivitas grup disini perlu kami jelaskan tentang keluarga ego itu istilah sosiologi dan antropologi. Pada istilah sosiologi dan antropologi untuk menyebut seorang anak dari generasi pertama. Sebagai anak itulah disebut keluarga inti pada saat ini ada seorang perempuan dari keluarga inti B dia juga seorang anak di keluarga inti B maka dia pun juga keluarga inti. Tapi keluarga inti ini Misalnya ego satu ini ego 2 misalnya seperti itu Itulah keluarga orientasi Mengapa disebut keluarga orientasi karena di sini mereka sebagai anak

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOHESIVITAS GRUP

Faktor	Derajat Kohesivitas	
	Tinggi	Rendah
Karakteristik Sosial	Homogen	Heterogen
Ukuran	Kecil (Intim)	Besar (Kurang Intim)
Mobilitas Fisik	Rendah	Tinggi
Efektivitas Komunikasi	Tinggi	Rendah

d. Mobilitas Fisik

Pada grup ini yang menjadi pertanyaan Apa kesulitan mereka dan keutuhan mereka serta kekompakan mereka juga menjalankan komitmen membangun grup tersebut. Seperti itu contoh salah satu pada grup musik yang setiap bulan vokalisnya ganti. Kesimpulannya adalah grup itu derajat kohesivitas nya tinggi atau rendah. Ternyata rendah karena mobilitas fisik anggotanya yaitu keluar masuk pergantian anggotanya tinggi. Suatu grup tersebut dikatakan solid dapat dipastikan bahwa semua personilnya tidak akan mengalami sering pergantian anggota personilnya. Meskipun mengalami pergantian dengan peraturan yang sangat ketat tadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas fisiknya menjadi rendah. Pada sisi lain mereka sering ke luar kota disisi lain dalam konteks jarak yang mereka tempuh pada derajat kohesivitas rendah. Dengan jarak yang ditempuh masing-masing anggota itu ke kantor dari desa misalnya seperti itu oh makin makin jauh jaraknya kemungkinan-kemungkinan nilai derajat kohesivitas nya rendah terlihat pada tingkat kemungkinan datangnya di lokasi. Pada kegiatan lain makin dekat jarak rumah anggota terhadap kantor dari rumah-rumah diskusi misal kelompok tani, tentu mereka akan makin sering datang. Semakin sering datang maka mobilitas fisik nyata karena dekat, orang ini dikategorikan derajat kohesivitas nya tinggi.

C. Dinamika Group dalam Interaksi

Pada refleksi dinamika grup ini pola interaksi yang berulang di antara anggota dan faktor yang mempengaruhinya ukuran grup tadi sudah jelas ukuran grup di sini di derajat kohesivitas. Pada pengambilan keputusan itu kalau misalnya satu grup ketuanya atau kepemimpinan ini Selaras dan dinamis dengan gaya kepemimpinan leadership yang bagus dalam mengambil keputusan pemimpinnya pasti akan di jalankan sesuai kesepakatan bersama bila ada kendala dapat bilang mari kita diskusikan dulu kan.

DINAMIKA GROUP

- ❖ Dinamika Grup: pola interaksi sosial yang berulang di antara anggota grup
- ❖ Faktor yang mempengaruhi:



Dinamika grup bisa bubar bisa tetap solid. Suatu grup itu berkembang mencapai tujuan-tujuannya bahkan bisa jadi organisasi formal dari grup itu. Berawal dari 2 Orang pertemanan mereka Mendirikan perusahaan jadi perusahaan besar penentunya adalah control untuk menyelaraskan persepsi. Tingginya tingkat upaya penyelelarsan kontrol tersebut tentu bisa eksis. Makin besar grupnya makin besar potensinya makin banyak variasi keahliannya kontribusi setiap anggota jadi kecil, Sehingga perlu diperhatikan makin sulit mencapai ke kesepakatan itu. Semakin besar group atau komunitas nya maka berpotensi menyebabkan komunikasi kurang intim sehingga derajat lebih rendah. Penjelasan ini tergantung pada cara komunikasi seperti penolakan peraturan yang sudah disepakati. Kontrol akan mudah pada kelompok yang ukurannya kecil dibanding group ukurannya besar dan juga kepemimpinan mengarahkan tugas-tugas menjaga kekompakan.

Pada grup terdapat dua ciri kepemimpinan dengan 2 figur yang berbeda. Pemimpin bisa sengaja dipilih dan bisa muncul karena tuntutan situasi misalnya munculnya tokoh dalam komunitas yang bisa menggerakkan kepedulian warga satu sama lain dalam situasi pandemic. Pengambilan keputusan yang diperhatikan ini berkaitan dengan orientasi pilihan mengevaluasi berbagai kemungkinan membuang pilihan yang tidak dikehendaki dan memilih yang terbaik. sehingga ada alternatif-alternatif solusi pada akhirnya diputuskan bersama yang akan di laksanakan dan dipatuhi bersama.

Daftar Pustaka

- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1
- Henslin, J. M. (2007). Sosiologi dengan pendekatan membumi jilid 2. <https://lib.ummetro.ac.id:443/images/docs/sosiologi+jilid+1.jpg>
- Pramudi, R. Y. (2015). Pengaruh gaya hidup konsumtif dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian kosmetik lokal. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 15(2), 280–301.
- Prasetya, S. P. (2014). Memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa. *Jurnal Geografi*, 12(1), 1–12.
- Setyawan, W. H., & Dewi, E. N. (2022). Parental involvement and Educational facilities on Student's achievement through learning motivation as moderator variable, Is it Effective?. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v6i1.1565>
- Syafar, M. (2017). Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1–22.
- Weber, A. (2003). Formality of equivariant intersection cohomology of algebraic varieties. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 2633–2638.

Biografi penulis



Dr. Wawan Herry Setyawan, S.Pd., M.Pd.

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas Islam Kadiri-Kediri. Menyelesaikan Strata 1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Kadiri 2005, Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Widya Mandala Katholik Surabaya 2009 dan Menyelesaikan Program S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya 2019. Berkarir sebagai Dosen di Universitas Islam Kadiri dari 2009 sampai sekarang. selain sebagai akademisi juga sebagai praktisi pendidikan dengan mendirikan Language Center baik bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Berperan aktif dalam forum Ilmiah dan juga Konsultan Pendidikan melalui yayasan pendidikan dan Perusahaan dalam bidang Publikasi Ilmiah.

BAB 3

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan.

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas kaum buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang-orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan jender, ras dan etnis.

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*” Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan (Edi Suharto,2003:12).

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Pengembangan

masyarakat meliputi usaha memperkokoh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, soliditas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata. Para aktivitis pengembangan masyarakat menolak ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini berbeda dengan kerja masyarakat (*community work*). Dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan transformasi atau perubahan sosial. Konsep pengembangan masyarakat berhubungan dengan penentangan secara kuat terhadap jalannya konsep *community work* yang sekarang sering diterapkan oleh penguasa. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan umumnya menggunakan *community work* dengan merujuk pada pekerjaan sukarela yang dilaksanakan oleh anak-anak muda pengangguran. Gagasan pengembangan masyarakat bisa dicermati eksistensinya dengan menggunakan perspektif ekologis (*ecological perspective*) dan perspektif keadilan sosial (*social justice perspective*). Munculnya perspektif ekologis bersumber dari kritik kelompok pecinta lingkungan “*Green*” terhadap tatanan sosial, ekonomi dan politik dewasa ini yang dianggap kurang peduli terhadap krisis lingkungan.

Kaum feminis dalam karya-karyanya menekankan analisis yang menuntut pengembangan sebuah masyarakat berdasarkan prinsip organisasi yang berbeda-beda, berupaya mengganti struktur yang penuh persaingan menjadi struktur yang menekankan kerja sama, mengganti individualisme dengan pengambilan keputusan secara kolektif, menghargai semua orang serta tidak mendukung praktek dominasi, kontrol, penekanan dan eksploitasi satu kelompok oleh kelompok lain. Kaum feminisme menghargai pentingnya sifat-sifat naluriah yang melekat pada kaum perempuan seperti mengasuh, memberi perhatian, berbagi, bermasyarakat dan suka damai, bukan sifat-sifat naluriah yang melekat pada kaum laki-laki seperti melakukan persaingan secara individual, agresi, dominasi, eksploitasi dan perang.

Paradigma adalah seperangkat asumsi, gagasan, pemahaman dan nilai-nilai yang menyusun aturan terhadap apa yang dinilai relevan atau tidak relevan, pertanyaan apa yang harus dan tidak ditanyakan, apakah pengetahuan dianggap sebagai sah dan apakah praktek dapat diterima. Setelah perjalanan waktu, sebuah paradigma terbukti tidak memadai sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan pengetahuan baru. Sebagai akibatnya, terjadi revolusi yang menghasilkan pengembangan paradigma baru dan reorientasi pemikiran ilmiah dalam sebuah pandangan yang baru.

Paradigma ini bisa diterapkan dalam bidang yang lebih luas. Para penulis dari berbagai disiplin ilmu mengungkapkan bahwa banyaknya masalah yang sekarang dihadapi oleh dunia bisa dipahami sebagai akibat dari tidak memadainya paradigma dominan yang secara beraneka ragam didefinisikan sebagai Barat, industrial, Cartesian, Newtonian, mekanistik dan nama-nama lain. Mereka berpendapat bahwa paradigma atau cara pandang ini di era sekarang sudah semakin tidak berfungsi. Kita mungkin tidak dapat mengatasi tekanan masalah jika tidak mengembangkan sebuah alternatif paradigma pemikiran baru. Ketika tidak semua penulis memiliki kepedulian terhadap

keadaan ini muncullah gerakan Green yang memfokuskan pada upaya pencarian paradigma pemikiran baru.

Paradigma yang dominan ini menekankan obyektifitas, rasionalitas ilmiah dan tidak menghargai pengalaman subyektif, intuitif dan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain. Metode ilmiah melihat alam sebagai sebuah mekanisme teratur dan tugas sains adalah menemukan hukum-hukum yang di dalamnya alam bekerja, melalui sebuah proses rasional dan linear. Untuk mengerjakan ini, sains memecah mesin itu menjadi bagian-bagian komponen, meneliti masing-masing bagian secara mendetail, bagian-bagian ini secara bersama-sama menyusun keseluruhan. Pemahaman terhadap bagaimana mesin bekerja seperti ini memungkinkan manusia untuk memahami, mendominasi dan mengeksploitasi alam.

Sungguh, kemajuan dilihat sebagai tujuan utama dari peradaban manusia. Seperti halnya susunan mesin yang dipecah dalam bagian-bagian komponen, masyarakat dilihat sebagai susunan dari individu-individu. Tindakan dan keinginan individu adalah hal yang paling penting. Dengan demikian, sistem ekonomi dan sosial cenderung dilihat dalam kaitan antara individu dan tindakan individu-individu dalam kepentingan mereka sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Pandangan ini didasarkan atas rasionalitas ilmiah, kemajuan, individualisme, dominasi terhadap alam, teknologi, eksploitasi dan lain, yang menjadi konteks bagi meningkatnya kapitalisme, revolusi industri, inovasi teknologi, pertumbuhan, perusakan alam, penguatan patriarki dan pengembangan alienasi struktur secara lebih luas.

Semuanya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya krisis lingkungan sekarang, kemerosotan nilai-nilai yang mengikat masyarakat, meluasnya kecenderungan keluarga untuk menjadi individual dan meningkatnya bentuk-bentuk perpecahan dalam keluarga kecil. Perlawanan terhadap paradigma dominan ini muncul dari berbagai sumber.

Sebaliknya mereka mengakui eksistensi yang tidak dapat diramalkan dan tidak menentu. Dalam ilmu sosial, kritik terhadap positivisme dan empirisme mempunyai pengaruh sama terhadap paradigma dominan. Ilmu sosial dibangun di atas analogi ilmu eksakta tradisional, dengan kajian empirik obyektif terhadap fenomena sosial, seolah-olah mereka adalah susunan benda-benda yang dapat diukur menurut hukum-hukum universal. Cara ini menunjukkan inkonsistensi logika dan kurang memadainya dalam membahas interaksi yang kompleks dari fenomena sosial. Pengembangan paradigma penafsiran alternatif serta teknik-teknik penelitian kualitatif dan naturalistik mewakili upaya untuk sebuah alternatif terhadap paradigma dominan.

Istilah Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) dipergunakan secara resmi di Inggris pada tahun 1948 untuk mengganti istilah lama *mass education* (pendidikan massal). Meskipun demikian, sejarah perkembangannya, dapat dilacak pada tahun 1925, ketika pemerintah Inggris menghadapi masalah yang terkait dengan tatanan hukum mereka. Pemerintah Inggris melalui Kantor Berita Kolonial (*The Colonial Office*) mengeluarkan suatu memorandum yang salah satu tujuannya adalah “untuk mengembangkan komunitas secara utuh”. Memorandum ini

memaparkan cara-cara untuk meningkatkan kehidupan komunitas di daerah koloni mereka yang pada akhirnya dikenal dengan nama pengembangan masyarakat.

Community Development menggambarkan makna yang penting dari dua konsep, yaitu: *community* dan *development*. *Community* bermakna kualitas hubungan sosial. *Development* berarti perubahan menuju kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Pemerintah Kolonial Inggris mendefinisikan pengembangan masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pengembangan masyarakat yaitu *Community development is the process by which the effort of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, sosial and kultural conditions of communities to integrate the communities into the life of the nation and enhance the contribute fully to national progress*".

Penekanan *pernyataan* tersebut menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu "proses" di mana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. Istilah-istilah pengembangan masyarakat (*community development*) telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses. Artinya, semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Rumusan di atas menekankan bahwa pengembangan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pengembangan masyarakat bekerja, terutama melalui peningkatan organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat. Akan tetapi, biasanya dengan bantuan teknis, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela. Isu pengembangan masyarakat berkembang dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan kehidupan manusia secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Dewasa ini, perkembangan dunia memperlihatkan berbagai ketimpangan yang terjadi di antara berbagai negara, terutama negara yang dianggap sebagai negara maju dan negara belum maju.

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Terdapat nilai-nilai kunci yang menjadi dasar bagi teori, tujuan, tugas, proses dan praktek pengembangan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar kegiatan, asumsi, komitmen dan prinsip pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat tampaknya sudah jelas

sehingga bisa diketahui oleh siapa saja. Sebagai contoh, pengembangan masyarakat bersandar pada pandangan bahwa masyarakat kurang beruntung bisa sepenuhnya mengendalikan kehidupannya ketika struktur-struktur dan lembaga-lembaga diubah. Untuk mengubahnya adalah dengan menentang struktur kekuasaan yang sudah ada dan merebut kekuasaan dari kelompok dominan. Contoh lain, mengubah tradisi dominasi kaum laki-laki di lingkungan keluarga atau lembaga-lembaga resmi serta menuntut kalangan wanita berani menentang kekuasaan kaum laki-laki dan merebut kekuasaan dari kaum laki-laki.

Berbagai aliran dalam perspektif *Green* tidaklah saling menolak (*mutually exclusive*) antara satu dengan lainnya. Aliran-aliran itu saling memperkuat atau tidak saling kontradiktif. Unsur-unsur dari setiap aliran itu dapat diringkaskan ke dalam empat prinsip dasar dari perspektif ekologi yaitu *Prinsip pertama, holisme*. Prinsip ini menuntut bahwa setiap peristiwa atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan hanya bisa dipahami secara tepat dengan merujuk kepada setiap bagian lain dalam sistem yang lebih besar. Prinsip ini memberi beberapa konsekuensi, yaitu filsafat yang berpusat pada ekologi, respek pada kehidupan dan alam, seperti halnya program-program masyarakat yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan-perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan (*need analysis*), dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of wants*) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (Nugraha, 2009) dan konsep perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkali dilakukan dari atas ke bawah (*top down planning*).

Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan peranan. Menurut Rina Wijaya, ciri-ciri perencanaan partisipatif adalah *pertama* terfokus pada kepentingan masyarakat, *kedua* partisipatoris, *ketiga*, dinamis, *keempat*, sinergitas, *kelima*, legalitas, *keenam*, fisibilitas (Al Ahsani *et al.*, 2021). Kemudian penolakan terhadap solusi-solusi linear dan penekanan perubahan organik. *Prinsip kedua, sustainabilitas*. Prinsip ini berarti bahwa sistem-sistem harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang; bahwa sumber daya alam seharusnya digunakan hanya dalam ukuran yang bisa diperbaharui lagi; bahwa sumber daya energi yang bisa diperbaharui yang digunakan; bahwa output terhadap lingkungan dibatasi pada tingkat yang bisa diserap; dan bahwa konsumsi haruslah dibatasi. Artinya, prinsip ini memberi beberapa konsekuensi, yaitu konservasi, konsumsi terbatas, ekonomi tanpa pertumbuhan, pembatasan pengembangan teknologi, dan anti kapitalis.

Prinsip ketiga, diversitas atau kemajemukan. Prinsip ini menekankan bahwa tidak perlu hanya satu jawaban atau satu cara yang benar dalam memecahkan masalah. Sebagai konsekuensinya, prinsip ini menghargai keragaman, tidak ada jawaban tunggal, adanya desentralisasi, komunikasi literal, jaringan kerja serta pengembangan teknologi sederhana. *Prinsip keempat, ekuilibrium atau keseimbangan.* Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan antara sistem-sistem dan kebutuhan akan keseimbangan di antara semua sistem itu. Sistem-sistem yang memiliki potensi konflik harus dikendalikan menjadi interaksional sehingga semua sistem itu dapat hidup bersama, koeksistensi, bahkan saling tergantung, interdependen.

Seperti halnya dengan pendekatan pengembangan masyarakat terhadap masalah kemiskinan di masyarakat menolak kerangka kerja penalaran logis yang cenderung beranggapan bahwa masalah-masalah sosial sering telah dikonseptualisasikan. Respon terhadap problem sosial biasanya tidak berupa restrukturisasi sosial atau menata kembali struktur masyarakat yang timpang, tetapi hanya melalui pembinaan secara hati-hati terhadap orang-orang yang mengalami masalah, untuk tujuan penyesuaian psikologis mereka terhadap keadaan yang dialami. Pandangan berdasarkan nalar sehat ini kadang-kadang mengarah pada upaya mengidentifikasi kambing hitam dari munculnya problem sosial. Pandangan ini juga cenderung melokalisir penyebab kemiskinan pada diri individu sendiri.

Keempat prinsip yang merangkum berbagai perbedaan aliran pemikiran *Green Response* di muka sangat diperlukan dalam mendasari berbagai model pengembangan masyarakat. Namun di sini perlu diingatkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum merangkum isu-isu lain yang mendasar bagi pengembangan masyarakat seperti prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, pemberdayaan dan lain-lain. Perspektif *social justice* (keadilan sosial) perlu diungkapkan sebagaimana mestinya karena ia akan menyempurnakan sudut pandang kita ketika menangani krisis lingkungan.

Pembangunan menyeluruh pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual, semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam aspek tersebut. Hal ini berarti bahwa keenam aspek berjalan bersama-sama dan mendapat porsi yang sama, tetapi mungkin salah satu diprioritaskan dengan tidak boleh meninggalkan yang lain. Contoh pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan kelima aspek pembangunan yang lain. Pembangunan masyarakat yang hanya mengkonsentrasikan pada satu aspek saja, akan menghasilkan pembangunan yang tidak lengkap. Oleh karena itu hal yang penting bagi pekerjaan masyarakat adalah selalu ke enam aspek tersebut secara bersama-sama.

Melawan kesenjangan structural, pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap beraneka praktek penindasan kelas, jender dan ras. Sebagai konsekuensinya, pengembangan masyarakat tidak akan menimbulkan penindasan struktural baru. Oleh karena itu, para aktivis sosial harus mencermati praktek-praktek penindasan yang kemungkinan terjadi dalam institusi media, sistem sosial, struktur organisasi, bahasa, ekonomi, pasar dan iklan. Di luar hal itu, perlu juga dicermati adanya praktek penindasan karena umur, ketidakmampuan fisik dan keadaan jender. Struktur dan proses pengembangan masyarakat perlu mengarahkan kepada struktur penindasan

yang dominan. Pengembangan masyarakat harus memfokuskan programnya kepada penanganan isu-isu kelas, jender, ras, umur, ketidak mampuan dan seksualitas untuk mencegah penindasan dimaksud.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, seperti tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud.

C. Elemen-Elemen Dalam Pengembangan Masyarakat

Elemen dalam pengembangan masyarakat meliputi tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan (*assessment*) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan proses menjalin relasi (*engagement*). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya *assessment non liner* terus dilaksanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya (Maitra Agastya, Viciawati Machdum and Hati, 2018).

Hal ini sejalan dengan pendekatan pengembangan masyarakat yang menekankan pentingnya sebuah proses dibandingkan hasil dalam pengembangan masyarakat. Untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) dan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai tujuan (*goal*) dari pengembangan masyarakat, maka proses yang dilaksanakan juga harus merefleksikan kedua prinsip tersebut (Maitra Agastya, Viciawati Machdum and Hati, 2018).

D. Indikator Keberhasilan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan melalui upaya membangun keinginan dan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Salah satunya dengan pengembangan masyarakat lokal yang bersifat *bottom-up*, yang mensyaratkan peranan aset komunitas untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan pengembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Peranan aset komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat diperlukan. Sejauh ini studi tentang peranan aset lebih menguraikan tentang peranan aset sosial dalam pengentasan kemiskinan, namun tidak cukup banyak membahas peranan jenis aset komunitas yang selainnya. Aset yang sangat berperan dalam pengembangan masyarakat adalah aset manusia, sosial, dan spiritual. Peranan berbagai aset komunitas membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya (Mawasti and Rizki, 2020).

Pemerintah harus melakukan perubahan mendasar dalam membangun aspek infrastruktur, perekonomian, dan sumberdaya manusia untuk menghilangkan keterbelakangan dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Mengevaluasi efektivitas dan pandangan *stakeholders* terhadap program tersebut dari aspek partisipasi pemanfaat dan aspek kemitraan dan merumuskan pola kemitraan dalam upaya strategi perbaikan program menunjukkan bahwa pemerintah merasakan bahwa partisipasi penerima manfaat cukup memadai, dan bahwa kemitraan dan pemerintah tidak memadai. Strategi untuk meningkatkan sinergi dengan program pembangunan adalah dengan mengintensifkan komunikasi bersama dengan pemerintah melalui pembentukan forum kemitraan pengembangan masyarakat.

Program Pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah. Program pengembangan masyarakat telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Program pengembangan masyarakat dirancang sebagai bagian dari program pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program diimplementasikan melalui pengelolaan di berbagai tingkatan wilayah dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building investment*) (Hadi,2009).

Pengembangan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan membuka stand bagi kelompok masyarakat. Faktor pendukung adalah kemampuan dan kemauan dalam menjalankan kegiatan komunitas. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana dalam pembangunan komunitas, namun pemerintah harus memiliki ide dengan cara program tertentu dalam mencapai tujuan masyarakat (Al Ahsani *et al.*,2021). Pengembangan masyarakat cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya aktivis-aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau akar rumput yang dilakukan melalui aksi-aksi pengembangan masyarakat.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada tingkat regional, nasional maupun global. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dapat di tafsirkan sebagai pembangunan nasional yang mendorong adanya pembangunan regional. Dimana pengembangan dan pemberdayaan menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat, Gagasan seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang lebih menekankan program implementasi yang bepihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang digunakan dalam model pembangunan masyarakat adalah pembangunan tingkat lokal atau menyatu dengan budaya lokal. Kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan social dan saling menghargai.

Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung jawaban, kesempatan pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan masyarakat dapat sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mengaruhi kehidupannya. Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang di integrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Keberhasilan dalam mengembangkan dapat dilihat dari seberapa berperannya masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan, menganalisis faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat, menganalisis keberhasilan, dan menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan pengembangan. Umur dan tingkat pendidikan sebagai faktor internal berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Demikian juga, terdapat hubungan antara faktor eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat, seperti pengaruh aktor penggerak dan fasilitas pendukung. Tetapi, tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan pengembangan. Meskipun, terdapat hubungan antara tahap menikmati hasil partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan pengembangan (Sundari and Virianita,2020).

Pemahaman akan pentingnya peningkatan kemampuan dan pengetahuan serta korespondensi keterampilan dalam menyongsong masa depan, meningkatnya kepercayaan diri sebagai agen pengembangan di daerah, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran

bahwa mereka mengemban tugas-tugas kemasyarakatan dan pembinaan terhadap generasi yang akan datang, terdapat beberapa faktor pendukung dominan yang berkaitan erat dengan pembinaan dan pengembangan masyarakat (Hanafie *et al.*,2021).

E. Program Pengembangan Masyarakat di Berbagai Negara

Kebijaksanaan program pengembangan masyarakat secara umum baik di negara maju maupun negara berkembang dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu *Pertama*, Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, Kebijakan program yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. *Ketiga*, Kebijakan program khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus (Rahmiyati, 2016)

Di Indonesia sasaran pengembangan masyarakat melalui teknologi tepat guna Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pengembangan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna adalah 1. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin. 2. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Posyantek dan wartek pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan dan sederhana.

Tujuan Pengembangan Masyarakat menekankan adanya konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pengembangan masyarakat adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dilakukan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pengembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahsani, N. et al. (2021) 'Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik', *Jurnal Al-Hikmah*, 19(2), pp. 139–156. [doi: 10.35719/alhikmah.v19i2.76](https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i2.76).
- H Setyawan, W., . R., . N., Budiman, A., . H., Sumarno, A., & Rais, P. (2018). Challenged Solving in Listening Through T-Mobile Learning Model. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.15), 443. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.15.25253>
- Hadi, A. purbathin (2009) 'Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia', Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)., p. 22.
- Hanafie, N. K. et al. (2021) dan teknologi serta keahlian agar secara real mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pada Seiring dengan upaya peningkatan kualitas masa yang akan datang. sumber daya manusia, sebagai tindak lanjut dari pembangunan yang terus menerus dilakukan II. BAHAN, pp. 37–41.
- Maitra Agastya, N. L. P., Viciawati Machdum, S. and Hati, G. (2018) 'Elemen-Elemen Pendukung Proses Asesmen Dalam Program Pengembangan Masyarakat Untuk Lingkungan Kondusif Bagi Anak', *Sosio Konsepsia*, 8(1), pp. 97–112. [doi: 10.33007/ska.v8i1.1458](https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1458).
- Mawasti, W. and Rizki, F. U. (2020) 'Pengembangan Masyarakat Islam Pada Bank Sampah Songolikoer', *Jurnal Inteleksia*, 02(01), pp. 27–54. Available at: <http://www.inteleksia.stidalhadid.ac.id/index.php/inteleksia/article/view/83>.
- Nugraha, A. (2009) 'Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5, p. 10. Available at: <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>.
- Rahmiyati, N. (2016) 'Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto', *Jmm17*, 2(02). [doi: 10.30996/jmm17.v2i02.506](https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506).
- Saptaria, L., & Setyawan, W. H. (2021). Desain Pembelajaran Technopreneurship Untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Uniska Kediri. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.37478/jpm.v2i1.880>
- Setyawan, W. H., & Nawangsari, T. (2021). Pengaruh E-Module Speaking Berbasis Website Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 339–346. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.7.2.339-346.2021>
- Sundari, D. and Virianita, R. (2020) 'Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pengembangan "Kampoeng Wisata Cinangneng" Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(5), pp. 695–712. [doi: 10.29244/jskpm.v4i5.570](https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i5.570).

Profil Penulis



Dr. Subhan Purwadinata, SE., ME adalah Dosen dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar-Nusa Tenggara Barat (NTB). Perjalanan akademik yang bersangkutan dimulai dari telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Mataram pada tahun 2003 dengan predikat kelulusan Terbaik (*Cumlaude*). Pada Jenjang Pascasarjana telah menyelesaikan pendidikan Magister atau pendidikan Strata 2 (S2) pada program Magister Ilmu Ekonomi (MIE) Universitas Brawijaya, Malang pada Tahun 2010. Berselang waktu lima tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 telah menyelesaikan pendidikan tertinggi dalam dunia akademik yaitu pendidikan Strata 3 (S3) di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Aktivitas sekarang menjadi dosen pada jabatan akademik Lektor pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samawa (UNSA). Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan telah memenangkan Hibah dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yaitu Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2014 dan tahun 2015 serta mengikuti kegiatan seminar internasional pada program *International Annual Symposium of Management (INSYMA) The New Strategic Communication* Tambon Saensuk, Amphur Muang Chonburi 2013, Thailand I March 1st, 2018 di Burapha University, Thailand.

BAB 4

MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Pengertian Model Pengembangan Masyarakat

Isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Sejalan dengan semangat keterbukaan dan penerapan otonomi telah menempatkan kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai stakeholders pembangunan. Kondisi ini telah berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluangnya bagi aktivis-aktivis social untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau akar rumput melalui skema aksi-aksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi dan emansipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global. Dari sini, upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dari upaya suatu bangsa dalam rangka memperbaiki tingkat inisiasi, partisipasi dan emansipasi para warganya dalam proses pembangunan

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu. Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*” Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. (Zubaedi, 2013). Pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), bersifat *bottom up* dan lokalitas. Munculnya pola pembangunan alternatif seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang menekankan prinsip keadilan maupun program implementatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan pendekatan model pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, dan pemabngunan pusat.

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu (Suharto, 2014) Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen

pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.

Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.

Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program diantaranya yaitu :

Pertama, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit.

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan stakeholder, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.

Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian

B. Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah

Gagasan *community development* (pengembangan masyarakat) muncul dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respon terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke 20. Beberapa ahli menyatakan, pengembangan masyarakat merupakan penjelmaan dari sebuah format politik baru pada awal abad ke-20. Pengembangan masyarakat mulai tumbuh

sebagai sebuah gerakan sosial pada tahun 1970-an menyusul mulai bangkitnya kesadaran progresif dari sebagian komunitas internasional untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang lemah (disadvantage), menerima model kesejahteraan redistributif secara radikal, memberlakukan model kewarganegaraan aktif dan memberi ruang bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan (participatory model)

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka. (Zubaedi, 2013)

Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggung-jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga berada di pundak masyarakat secara keseluruhan. Salah satu wujud rasa tanggung-jawab yang dimaksud adalah sikap mendukung dari warga masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan keterlibatan (partisipasi) aktif warga masyarakat daerah.

Pentingnya peranserta warga masyarakat tersebut terutama karena sebagai organisasi dengan sistem terbuka, Pemerintah Daerah senantiasa membutuhkan adanya importation of energy guna menopang kelangsungan hidupnya. Selama ini membuktikan bahwa sumber energi berupa dana dan personil yang sangat diperlukan alampembangunan daerah yang otono hampir hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat. Realaliti sesemacam ini telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari daerah terhadap pusat dan dengan sendirinya menghilangkan kemandirian daerah (otonomi). bahkan dari sudut pandang paling ekstrim, campur tangan pusat dalam penetapan kebijakan daerah merupakan konsekuensi dari tingginya ketergantungan tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka peran serta warga masyarakat sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai substitusi energi dari peran pusat. Dengan kata lain, peranserta warga masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi Daerah.

Agar warga masyarakat dapat berperan serta, mereka harus memiliki kemampuan, dan iklim yang menunjang ke arah tersebut. Pemerintah Daerah perlu melakukan Pengembangan dengan memberdayakan warga masyarakat dan menciptakan iklim yang memungkinkan peranserta warga masyarakat (*empowerment nt is is roroad to to participation*), yang pada gilirannya akan mempengaruhi dan menguntungkan penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam konteks pemberdayaan dan partisipasi warga masyarakat sangat erat keterkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah.

Konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya keterkaitan yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. terutama pada tingkat pengambilan keputusan, upaya pengembangan masyarakat akan menciptakan beragam keterkaitan

di tingkat kelompok, komunitas, dan lokalitas. Beragam keterkaitan tersebut (level organisasi) tersebut berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu sistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Tingkat lokalitas dicirikan oleh kesatuan komunitas yang memiliki relasi sosial dan ekonomi, dengan pusat interaksi sebagai pusat pertumbuhan. tingkat komunitas digambarkan sebagai unit interaksi sosial ekonomi yang lebih menunjuk kepada sistem administrasi teritorial yang lebih rendah.

Dalam konteks ini, konsep lokal mengandung pengertian: pertama, ikatan sosial yang berlandaskan teritorial di mana masyarakat di daerah tersebut hidup dalam suatu lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas. Kedua, ikatan sosial berdasarkan lingkup pekerjaan (profesi) dimana hubungan antar anggotanya tidak permanen, tetapi mempunyai intensitas interaksi yang tinggi dalam suatu waktu tertentu dan ketiga, ikatan sosial yang dibangun berdasarkan jejaringan sosial (social networking) sebagai nilai tambah dari social capital (modal sosial) dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat.

Dengan demikian, secara sosiologis upaya pengembangan masyarakat perlu didekati dengan pengembangan berbasis lokal (daerah) yang menjalin ikatan sosial antara tingkat kelompok, komunitas, dan lokalitas.

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, pekerja dalam layanan kemanusiaan dan anggota kepanitiaan masyarakat lokal yang tidak dibayar. (Kenny, 1994) Terminologi pengembangan masyarakat dalam perjalanannya merujuk pada: sebuah pekerjaan profesional, sebuah metode atau pendekatan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, sebuah komponen dalam kerja pelayanan kemanusiaan, sebuah pemikiran dan pendekatan intelektual terhadap dunia dan sebuah aktivitas politik.

Pengembangan masyarakat menghadapi isu-isu baru, namun pendekatan yang dipakai dalam organisasi kemanusiaan didasarkan pada ide untuk kembali kepada zaman masa lalu. Ide ini menekankan bahwa manusia dapat dan harus menyumbang secara kolektif bagi cara sebuah masyarakat bertahan, melalui keikut-sertaan dalam mengambil keputusan, mengembangkan perasaan memiliki terhadap kelompok dan menghargai sesama manusia. Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun supportive communities, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.

Pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah harus sejajar, sebanding dan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-ukuran dibawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu: Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Setiap 20 tahun, akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. RPJPD disusun berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) demokrasi; (c) berkeadilan; (d) keterpaduan; (e) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (f) transparansi; (g) keterbukaan; (h) otonomi daerah; (i) tata kelola pemerintahan yang baik; (j) berkelanjutan; (k) berwawasan lingkungan; (l) efisien; (m) efektif. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi, Kabupaten, Kota dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur, Bupati, wali kota serta Wakil Gubernur dan wakil bupati serta wakil wali kotapada periode berkenaan.

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; (c) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (d) menjamin tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Ruang lingkup RPJPD meliputi: gambaran umum kondisi daerah; visi dan misi; sasaran pokok pembangunan jangka panjang; arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan tahapan dan prioritas pembangunan.

Pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah harus memberlakukan masyarakat daerah khususnya pedesaan sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek

pembangunan dengan mengikut sertakan mereka melalui program “serap aspirasi” melalui legeslatif dan alat komunikasi lainnya. Secara umum, cara ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori.

Pertama, (anggota) parlemen menunggu secara pasif aspirasi yang disampaikan oleh anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan menerima serapan aspirasi dari partai-partai politik induk semang masing-masing anggota parlemen. Penyampaian aspirasi oleh masyarakat difasilitasi secara hukum maupun teknis. Beberapa bentuk penyampaian aspirasi secara langsung adalah unjuk rasa (demonstrasi), mengirim surat, maupun terlibat dan/atau dilibatkan dalam proses politik di DPRD melalui mekanisme RDPU, ataupun berkomunikasi dan melakukan lobby secara pribadi dengan anggota dewan. Sementara itu serapan aspirasi dari partai politik induk secara formal, di DPR terutama, berlangsung atau dilakukan di dalam dan di bawah koordinasi fraksi-fraksi di DPR. UU menyatakan, meski bukan alat kelengkapan DPRD, fraksi dibentuk untuk mendukung dan memperlancar tugas dan wewenang anggota DPRD.

Kedua, anggota parlemen secara sendiri-sendiri maupun berkelompok secara proaktif melakukan kegiatan mencari dan menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan perundang-undangan pun menetapkan masa khusus bagi anggota parlemen untuk melakukan kegiatan ini, yakni: masa reses, yang dijelaskan sebagai kegiatan (anggota) parlemen di luar masa sidang, atau di antara masa-masa sidang, dan dilangsungkan di luar gedung parlemen. Dalam satu tahun, DPRD khususnya mempunyai empat masa sidang, yang berarti juga mempunyai empat masa reses. Pada masa reses ini, dua bentuk kegiatan diselenggarakan, yaitu: kunjungan kerja komisi atau badan; dan kunjungan kerja anggota parlemen kepada konstituen di daerah pemilihan. Sebagaimana ditegaskan secara resmi, kunjungan kerja ini dilaksanakan DPRD dalam kerangka representasi rakyat dan pengejawantahan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah lainnya. Secara teoritis, kunjungan kerja ditujukan untuk menyerap aspirasi rakyat di masing-masing daerah pemilihan.

C. Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.

Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula.

Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.

Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945..

Visi Pembangunan Nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin.

Misi Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai (Sari, 2021).

Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketenteraman masyarakat.

Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran

Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggungjawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia (Shalahudin, 2021).

Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional.

Berdasarkan visi dan misi itu, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan nasional. Berikut secara sederhana dapat diberikan bagan tentang paradigma pembangunan nasional berdasarkan konsep, prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Untuk upaya pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat secara keseluruhan dengan model pemberdayaan. Dalam beberapa situasi, pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, walaupun pada akhirnya tetap berkaitan dengan kolektivitas, Pemberdayaan dalam pelaksanaannya, proses dan pencapaian

tujuan dilakukan melalui Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. (Nawawi, 2009)

Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi yang tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah (Bito, 2021). Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Penyokongan: memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan;

Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan adanya program pembangunan nasional yang mengedepankan pembangunan desa atau pembangunan yang dimulai dari pinggir seperti layaknya makan bubur dimana desa diberikan keleluasaan penuh dalam mengurus pemerintahannya dengan didukung oleh sumber daya dimiliki. Sehingga diharapkan pembangunan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberdayakan dirinya dalam proses pembangunan demi tercapainya tujuan dari pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bitto, G. S., Fredy, F., & Setyawan, W. H. (2021). Ethnomathematics: Design of Sabuk Tradisional (Keru) Bajawa as A Learning Media For Elementary School. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 9(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v9i1.9835>
- Kenny, S. (1994). *Developing communities for the future*. Melbourne: Thomson Publishing Company.
- Nawawi, I. (2009). *Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Sari, H. P., & Setiawan, W. H. (2021). Peningkatan Teknologi Pendidik Pesantren Anak Sholeh melalui MEMRiSE: Coaching & Training. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 81–90. <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/arti>
- Shalahuddin, Y., Rahman, F., & Setyawan, W. H. (2021). Pemodelan Simulasi Untuk Praktikum Teknik Otomasi Industri Berbasis Matlab/Simulink Di SMKN 1 Kediri. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52643/pamas.v5i1.1061>
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group.

IDENTITAS PENULIS



Trusti Dhiani Henartiwi, lahir di Jatiroto 10 November 1960. Lulus Pendidikan S1 di FISIPOL Univ Negeri Jember, S2 Ilmu Ekonomi di Univ Darul 'Ulum Jombang. Sekarang menjadi Tenaga Edukatif di Unuversitas Darul'Ulum Jombang, Assesor Pendamping, Vasilitator UMKM Jawa Timur dan Pemilik Wirausaha MS Hand Embroiderry dan menjadi Instruktur Kerajinan Seni Sulam / Border dan Jahit Kreatif. Mempunyai berbagai sertifikat Kompetensi BNSP pada bidang Sulam Jenjang II, Koperasi dan UMKM / Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelatih, Pendamping dan Fasilitator Koperasi/ UMKM, Basic Life Skills, Mengelola Hidup & MerencanakanMasaDepan (MHMMMD) dan Business Matching, Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Jawa Timur. Menjadi dan ikut serta dalam berbagai organisasi sosial; - Pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPD Jatim, Pengurus Hipmikimdo Jatim, Pengurus Perkumpulan Pengusaha Busana Surabaya (sekarang) dan Pengurus Perkumpulan Pengusaha Perempuan Indonesia, Pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPD Jatim. Menjadi pemateri di berbagai kegaitan tingkat Jawa Timur khususnya pada p pemberdayaan perempuan.

BAB 5

TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Tantangan Dari Internal

menjelaskan pengertian pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip keadilan sosial dan saling menghargai (Zubaedi 2013).

Pengembangan masyarakat (community development) adalah konsep dasar yang menggaris bawahi sejumlah istilah yang digunakan sejak lama seperti community resource development, rural areas development, community economic development, rural revitalisation dan community based development. Community development menggambarkan makna yang penting dari dua konsep community bermakna kualitas hubungan sosial dan development perubahan ke arah kemajuan yang bersifat terencana dan gradual, makna ini penting untuk arti pengembangan masyarakat yang sesungguhnya (Blackburn dalam Nasdian, 2003a)

Pengembangan masyarakat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik dan mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan. Dalam definisi formal menurut PBB dalam Nasdian (2003a), "community development is a process whereby the effort of Government are united with those of the people to improve the social, cultural, and economics conditions in communities" yaitu sebuah proses usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Secara umum, pengembangan masyarakat adalah suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai bentuk dan upaya dengan mengaplikasikan teori dan praktik berupa kepemimpinan lokal, aktivis, dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan dari komunitas (Hastuti, 2021).

Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari berbagai segi kehidupan baik sosial, ekonomi, kultural dan struktural. Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan isu-isu penting untuk kesejahteraan komunitas baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak lainnya. Pengembangan masyarakat merupakan upaya-upaya pembangunan ditingkat komunitas yang memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholder lainnya (Nasdian, dalam Ahmad Fatah 2018).

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Jika selama ini program pengembangan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh berbagai macam perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap masyarakat (corporate social responsibility/CSR), maka pada saat ini lembaga pendidikan pun telah turut serta dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat. Di berbagai negara termasuk Indonesia lembaga pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran anggota masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang bisa bertahan tanpa pendidikan. Dengan pendidikan setiap individu diharapkan dapat mencapai pembinaan pribadinya sebagai manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Setiap lembaga pendidikan harus bisa mengembangkan pendekatan ekonomis tanpa mengorbankan kualitas akademis agar mendapatkan partisipasi yang paripurna dan lengkap. Setiap lembaga harus tetap memberikan kesempatan pada anak-anak berbakat dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan dengan kualitas prima hal ini dilakukan untuk menggali potensi yang ada sehingga mereka bias menjadi agen perubahan pada masa yang akan datang. Dunia kini dan masa depan adalah dunia yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (Herry, 2019). Siapapun yang menguasai keduanya, secara lahiriah akan menguasai dunia. Bila dikatakan ilmu pengetahuan merupakan infrastruktur, maka keduanya merupakan suprastruktur dunia internasional, termasuk kebudayaan, moral, hukum dan juga perilaku keagamaan (Hafidhudin, dalam Ahmad Fatah 2018).

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, sebagaimana dikemukakan Gaventa dan Valderama dalam pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial badan pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial kementerian sosial republik Indonesia, (2019) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu memanfaatkan sumber-sumber lokal yang mereka miliki secara kategoris terdiri dari;

- a. Modal manusia yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
- b. Modal alam yang meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberdaya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
- c. modal finansial meliputi sumber sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi dan sebagainya.
- d. Modal fisik meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
- e. Modal sosial yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai oleh tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah dan kondisi rumah yang boleh dikatakan tidak layak huni. Menurut the world bank (Bank Dunia) kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana orang banyak mengalami hambatan untuk memperoleh kesejahteraannya. Kondisi ini termasuk ketidakcukupan akan konsumsi, kerawanan terhadap risiko yang mengancam kehidupan, terbatasnya pendidikan, kurangnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan, infrastruktur yang gagal menyediakan kebutuhan sehari-hari (air bersih dan perumahan) serta rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial politik (Mukherjee, 2002, dalam pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial badan pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial kementerian sosial republik indonesia (2019).

Kita hidup di era perubahan sosial yang mengagumkan, yang ditandai dengan transformasi yang sangat berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya. Yang demikian itu berarti bahwa realitas sosial merupakan sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat adalah perubahan yang bersifat positif dan negatif. Ginsberg mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma nilai dan fenomena kultural. Suatu hal yang perlu diperhatikan kenyataan bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan termasuk pada masyarakat primitif dan masyarakat kuno sekalipun.

Dari definisi di atas menekankan bahwa pengembangan masyarakat, merupakan suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu (Zubaedi, 2013: 6). Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (disinterest). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampilkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan

informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya di lokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan. (Suharto, 2014: 38).

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu.

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.

- l. Mengurangi angka pengangguran m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.
- m. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- n. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- o. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
- p. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- q. Menkuatkan kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan

B. Tantangan Dari External.

Pada era mendatang, tenaga kerja manusia menghadapi tantangan yang berat. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat dan manusia dituntut untuk memiliki spesialisasi tertentu, dan tiap-tiap spesialisasi hanya mengenal dirinya sendiri secara mendalam tetapi tidak banyak mengetahui hal-hal di luar dirinya. Manusia makin terkotak kotak oleh aturan teknis yang membelenggu dirinya, sehingga hubungan sosial yang bersifat impersonal semakin menggejala. Pada akhirnya iptek akan mengganti kedudukan dan peranan manusia sebagai pekerja dan individu yang utuh, karena pekerjaan rutin manusia dikerjakan oleh mesin yang cara kerjanya dianggap lebih teliti, lebih efektif, efisien, dan lebih berani. (Sri Agustin Sutrisnowati dan Bambang Saeful Hadi)

Untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era global dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Peningkatan mutu pendidikan Mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan, maka sektor ini harus memperoleh porsi yang besar dalam pembangunan. Sayangnya hingga kini sektor ini masih terseok-seok karena tiadanya kesungguhan pemerintah untuk mendongkrak sektor ini. Ketidaksungguhan ini ditunjukkan oleh minimnya dana yang diposkan untuk sektor pendidikan ini, hal ini sungguh ironis bila dibandingkan jumlah dana yang diposkan di sektor perbankan, militer, dan pembangunan fisik. Berdasarkan kenyataan ini tidak mengherankan bila level pendidikan bangsa Indonesia berada di bawah Vietnam. Untuk memajukan sektor ini, maka perlu ada kemauan baik dari pemerintah untuk memperbaikinya melalui peningkatan porsi dana pendidikan, perombakan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alat-alat laboratorium dan perpustakaan, program buku murah, sekolah murah, dan kerja sama dengan negara lain secara intensif. Ada baiknya pemerintah meniru upaya negara-

negara berkembang lain yang lebih maju dalam pendidikan, seperti Malaysia, India, dan Korea.

- b. Penguasaan bahasa asing Di era global saat ini bahasa asing merupakan sarana utama untuk berkomunikasi bisnis, kerjasama, pendidikan, alih teknologi, dan lain lain. Berkembangnya berbagai perusahaan yang mempunyai jaringan internasional menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bahasa asing semakin besar. Untuk menjadi tenaga kerja di era global tidak cukup hanya berbekal keterampilan tertentu saja, tetapi harus dibekali kemampuan tambahan, yakni salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Perancis, Jepang, Mandarin).
- c. Penguasaan teknologi informasi (TI) Penguasaan komputer sebagai basis TI mutlak harus dikuasai para tenaga kerja dan manusia Indonesia pada umumnya bila ingin eksis di era penuh persaingan ini. Kini, tanpa penguasaan TI, tenaga kerja Indonesia tidak akan dipakai oleh lembaga lembaga atau perusahaan bonafid baik pada pasar lokal apalagi pasar global (luar negeri). Adanya TI juga memunculkan kebutuhan tenaga kerja baru lain yang berkaitan dengan TI, seperti teknisi, ahli perangkat lunak dan perangkat keras, programmer, operator, dan lain-lain.
- d. Latihan kerja Latihan kerja merupakan tahapan penting yang mesti dilewati oleh para pencari tenaga kerja. Perlunya latihan kerja ini adalah untuk memperkenalkan para anak bangsa terdidik agar tidak gagap dalam memasuki dunia kerja. Disinilah konsep link and match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja dapat dibangun. Sayangnya hingga kini jarang sekali lembaga yang menyediakan latihan kerja secara memadai. Lembaga latihan kerja milik pemerintah yang bernama Balai Latihan kerja (BLK) ternyata belum mampu menampung para pencari kerja, apalagi sarana dan prasarananya juga sangat minim. Untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, BLK sebagai representasi pemerintah harus memiliki political will di antaranya dengan mengaktualisasikan diri dengan perkembangan global melalui kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga lain. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak penduduk untuk memperoleh pekerjaan dan dalam rangka mendayagunakan jumlah penduduk yang besar sebagai modal pembangunan yang potensial dan produktif.
- e. Penyempurnaan sistem informasi ketenagakerjaan Salah satu kelemahan manajemen ketenagakerjaan di Indonesia adalah lemahnya sistem informasi ketenagakerjaan (SIK). SIK dapat menyajikan peta ketenagakerjaan. Peta tersebut dapat memberikan informasi berapa jumlah pencari kerja, klasifikasi keterampilan/spesialisasi, lapangan kerja apa saja yang tersedia atau potensial, di mana, berapa persentase yang dapat terserap tiap periode tertentu, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Adanya SIK ini bermanfaat bagi pemerintah dan tenaga kerja sendiri. Pemerintah akan dengan mudah membuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan bagi tenaga kerja

sendiri dapat memudahkan dalam pencarian peluang sesuai dengan kemampuan dirinya

- f. Perbaikan perencanaan dan evaluasi tenaga kerja Perencanaan tenaga kerja mempunyai keterkaitan dengan SIK. Perencanaan yang baik harus disertai data-data yang akurat disertai dengan perhitungan yang matang. Perencanaan tenaga kerja bermanfaat untuk menghindari adanya ketidakseimbangan komposisi jenis tenaga kerja dengan jenis peluang kerja. Suatu contoh, peluang kerja yang tersedia secara luas ada pada sektor kelautan tetapi yang terbina justru tenaga kerja sektor pertukangan atau sebaliknya. Hal penting yang harus dilakukan dalam perencanaan adalah adanya keseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan peluang kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dari apa yang telah direncanakan hasilnya dievaluasi untuk perbaikan pembuatan perencanaan berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.
- g. Pemanfaatan pasar kerja di luar negeri Pasar kerja luar negeri merupakan peluang emas bagi penyaluran tenaga kerja. Kesempatan tersebut muncul akibat dibukanya isolasi dari berbagai negara, meleburnya batas-batas formal suatu negara, dan perbedaan karakteristik tenaga kerja. Hanya saja, tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak siap untuk memasukinya. Para TKI hanya dapat memasuki bidang-bidang yang telah ditinggalkan oleh tenaga kerja setempat. Menurut laporan Ditjen Binapenta (2000) tercatat TKI yang bekerja di luar negeri sebanyak 457.876 orang. Peluang kerja yang dapat dimasuki oleh sebagian besar mereka hanya pada sektor domestik sebagai tenaga kasar, misalnya pembantu rumah tangga (PRT), bidang konstruksi bangunan, dan sektor pertanian

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaanya. Dalam keberagaman konteks masyarakat majemuk, kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah ini bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan. Keanekaragaman kebudayaannya Indonesia dapat dikatakan suatu keunggulan. Bila dibandingkan negara lain dari kebudayaan yang beragam dan bervariasi. Terpenting adalah secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Keunggulan-keunggulan dari keanekaragaman bangsa Indonesia, antara lain:

- a. Keanekaragaman kebudayaan sangat menarik dan dapat dijadikan objek pariwisata

- b. Keanekaragaman budaya daerah dapat membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila, sesuai Tap MPR No. II tahun 1998, yang berbunyi :Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia merupakan upaya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa
- c. Tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda.
- d. Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia (ada lebih dari 746 bahasa daerah)
- e. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama dan budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakatnya, dan keragaman tersebut dapat kita satukan dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Suharto dalam (Ahmad Fatah 2018) Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses swadaya masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi masyarakat pada bidang sosial, politik, kultural dan ekonomi. Sebagai suatu metode, pengembangan masyarakat menekankan adanya proses pemberdayaan, partisipasi dan peranan langsung dari warga komunitas. Istilah pengembangan masyarakat dapat berarti untuk beragam orang. Sander dalam Nasdian dalam (Ahmad Fatah 2018) mengatakan bahwa pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu proses, metode, program atau gerakan. Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses bergerak dalam tahapantahapan dari suatu kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ketahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan dan perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi. Pengembangan masyarakat sebagai suatu metode merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat dicapai. Sebagai suatu program pengembangan masyarakat dinyatakan sebagai gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan.

Program pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan merupakan suatu perjuangan sehingga menjadi alasan sehingga membuat orang-orang mengabdikan. Pengembangan masyarakat dalam arti ini cenderung melembaga dan membangun struktur organisasinya sendiri, menerima prosedur dan praktisi profesional dengan demikian fokusnya adalah mendorong gagasan-gagasan pengembangan masyarakat. Definisi pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh PBB (1960) adalah “community development is the processes by which the effort of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economy, sosial, and cultural conditions of communities, to integrate the communities into the life of the nation and enhance the contribute fully to nation progress” yaitu sebuah proses usaha bersama antara

pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian setiap program pengembangan masyarakat harus mampu menanggulangi masalah dan isu-isu untuk kesejahteraan komunitas secara konvensional oleh pemerintah ataupun pihak lainnya secara efektif model-Model Pengembangan Masyarakat Menurut Suharto dalam (Ahmad Fatah 2018) terdapat tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu

- a. pengembangan masyarakat lokal (locality development)
- b. perencanaan sosial (social planning)
- c. aksi sosial (social action).

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” (process goal) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat yang bernuansa bottom up.

Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, buta huruf, kesehatan dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan social lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal). Sistem klien perencanaan social umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups) atau kelompok rawan sosial ekonomi seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu bahkan wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima pelayanan” (beneficiaris). Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuat kebijakan, penentuan tujuan dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal. Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, pendistribusian sumber, dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah system klien yang seringkali menjadi “korban” ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses maupun hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemelaratan dan keadilan. Konsep dan prinsip pengembangan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari Masyarakat
2. Pengembangan masyarakat yang penuh seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multi tujuan
3. Perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan;
4. Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat
5. Identifikasi, dorongan semangat dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program;
6. Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek
7. Pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang;
8. Proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah
9. Penerapan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten, pengaturan administratif yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumberdaya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Hastuti, S. W. M., & Setyawan, W. (2021). Community Service in Study Potential Technology of Education Tour and Business Prospects of Traders in Tulungagung. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–144. <http://www.uniflor.ac.id/e-journal/index.php/mahajana/article/view/952>
- Herry Setyawan, W., Budiman, A., Septa Wihara, D., Setyarini, T., & Nurdyansyah, R. (2019). R., & Barid Nizarudin Wajdi, M.(2019). The effect of an android-based application on T-Mobile learning model to improve students' listening competence. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1175/1/012217/pdf>
- Salusu, J, 1999. *Pengambilan Keputusan Strategi*. Gramedia Wi diasarana. Jakarta
- Sarundajang, 2012. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”. Sumbersari Indah. Bandung.
- Setyawan, W. H., & Dewi, E. N. (2022). Parental involvement and Educational facilities on Student's achievement through learning motivation as moderator variable, Is it Effective?. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v6i1.1565>
- Siagian S. P, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta
- Siswanto, H.B. 2012. *Pengantar Manajemen*. P.T. Bumi Aksara. Jakarta Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Subianto P, et.al, 2009. *Membangun Kembali Indonesia Raya*. Institut Garuda Nusantara. Jakarta.
- Suharto E, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Suhartono, Irawan, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabet. Bandung
- Sumaryadi IN, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta.
- Sumo diningrat G, 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Sztompka P, 2010. *The Sociology Of Social Change*. (terjemahan), Prenada. Jakarta.
- Usman Husaini, 2013. *Manajemen : Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Usman Sunyoto, 2010. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Zubaedi, (2013) *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

PENULIS



Endah Marendah Ratnaningtyas, lahir di Yogyakarta pada 14 November 1972 dan sekarang menetap di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 13 Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, pada lulus tahun 1984, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 109 Jakarta Timur lulus tahun 1987, dan SMA Negeri 48 Jakarta Timur lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan Strata 1 di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, lulus tahun 1994, tahun 1997 melanjutkan studi Strata dua di Universitas Borobudur Jakarta, mengambil konsentrasi magister manajemen dan lulus tahun 2000. Sekarang, tengah menempuh studi strata tiga (S3) sejak 2017, dan sedang dalam proses desertasi di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) konsentrasi strategik manajemen. Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Mahakarya Asia, (UNMAHA) Yogyakarta. Juga sebagai dosen LB di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Juga bergabung di LSP Talenta sebagai Assesor dan Trainer. Juga sebagai konsultan SDM dan Pemasaran di beberapa Koperasi, UKM, dan lembaga-lembaga keuangan mikro

Penulis bisa dihubungi melalui E-mail : ratnaningtyasendh9@gmail.com

Bab 6

Kedudukan Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat

Indonesia adalah negara yang memiliki pluralisme budaya yang sangat kaya. Pluralisme atau, keragaman budaya ini membentuk komunitas-komunitas dan menjadi salah satu potensi tersendiri untuk membangun kesejahteraan dan pemahaman bersama dalam suatu bangsa melalui berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk itu optimalisasi potensi yang ada perlu dilakukan untuk diarahkan sebagai salah satu sumber kekuatan dalam potensi komunikasi sosial yang berkembang melalui berbagai interaksi antar masyarakat dalam bentuknya yang beragam sebagai bagian kebudayaan masyarakat setempat baik melalui budaya immaterial seperti terlihat dalam bahasa, tradisi, kebiasaan, adat, nilai moral, etika, religi, kesenian, sistem kekerabatan dan sebagainya.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengarah pada kondisi yang lebih baik. Melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukkan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat.

Komunikasi sosial sebagai salah satu fungsi komunikasi dalam komunitas seperti dikatakan oleh Deddy Mulyana (2004), "... salah satu fungsi komunikasi adalah sebagai komunikasi sosial yang setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi membantu masing-masing individu dalam membentuk konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Prinsipnya adalah bagaimana komunikasi dapat membantu individu dalam bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama", hal ini secara implisit mengartikan bahwa fungsi komunikasi sosial adalah komunikasi kultural, budaya menjadi perilaku dalam manusia berhubungan, perhatian pada bagaimana interaksi yang terjadi antar manusia dalam mencipta makna melalui simbol-simbol menjadi sangat penting untuk menciptakan simbol yang dipahami bersama antar komunitas yang ada. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Clifford Geertz bahwa kebudayaan adalah tingkah laku yang dipelajari dan fenomena mental. Sedang komunikasi adalah alat untuk belajar dan mewujudkan mental ke dalam bentuk simbol-simbol (Andrik Purwasita : 2003).

Perlu dipahami bahwa komunikasi sosial berlangsung dalam konteks atau lingkungan fisik dimana seseorang itu bermukim yang melahirkan pemahaman tertentu tentang budaya dan pengetahuan. Dan pengetahuan atau pemahaman seseorang pada peristiwa tertentu akan menentukan bagaimana mereka memaknai interaksi dan komunikasi yang berlangsung antar anggota kelompok. Komunitas terbentuk dari keberhasilan komunikasi sosial yang ada, kesepahaman simbol-simbol dalam suatu kelompok yang mengikat anggotanya dan menarik diluar anggotanya yang memiliki kesepahaman, maka kemampuan untuk menciptakan kesamaan arti dari

simbul-simbul yang ada menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan diantara komunitas yang ada dengan masyarakat untuk membangun keragaman dalam kedudukan dilingkungannya dan kemampuan menciptakan kesepahaman antar komunitas tersebut menjadi kunci pokok kedudukan komunitas dalam pengembangan suatu masyarakat.

Dalam melakukan pengembangan masyarakat kearah perubahan yang lebih baik kita tidak boleh meninggalkan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat tersebut. Intervensi komunitas merupakan suatu upaya pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Model intervensi komunitas ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial di Indonesia.

A. Komunitas sebagai subyek pengembangan masyarakat

Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berasal dari kata dasar *communis* yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. Pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme berbagai lingkungan, yang menyatukan atau mengikat anggota komunitas adalah mereka memiliki ketertarikan, hobby, tempat asal yang sama yang kemudian mengikat mereka menyatu dalam suatu ikatan yang terorganisir. Dalam komunitas, individu-individu didalamnya memiliki tujuan, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Seperti dikatakan oleh Mac Iver seperti dikutip dalam buku Cholil Mansyur. “*Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota.*” (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 69)) *community* diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial didalamnya. Dalam pertalian kelompok sosial kita mengenal adanya unsur-unsur dalam *sentiment community*, yakni :

- a. Seperasaan : Unsur seperasaan muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan.
- b. Sepenanggungan : Kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya.
- c. Saling memerlukan : Perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis.

Ikatan yang timbul dari unsur-unsur *sentiment community* tersebut mampu mengikat seluruh anggota untuk merasa seiya sekata dan membangun ikatan yang erat diantara anggotanya.

Menurut Montagu dan Matson, ada sembilan konsep komunitas dalam masyarakat, yakni :

- a. Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok.
- b. Komunitas mampu memberi makna pada anggota.
- c. Adanya pemerataan distribusi kekuasaan.
- d. Anggota komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggung jawab.
- e. Anggota memiliki visibilitas dan kemampuan memecahkan masalah sendiri.
- f. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama.
- g. Pelayanan pada masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang membutuhkan.
- h. Mampu menyelesaikan heterogenitas dan beda pendapat.
- i. Mampu menyelesaikan konflik dan managing conflict.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang direncanakan secara sistematis untuk mengarah pada kondisi yang lebih baik yang telah ditentukan. Memandang pengembangan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukkan bahwa pengembangan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan kemampuan untuk menyatukan dan menselarskan antara kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan pengembangan masyarakat yang telah ditentukan. Proses pengembangan masyarakat dan pengambilan keputusan kerap kali dilakukan secara top-down. Pengembangan yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat (Setyawan, 2020)

Mengamati keseringan program pengembangan masyarakat tersebut diatas maka pendekatan pengembangan yang berorientasi menggunakan pendekatan komunitas masyarakat akan sangat membantu terlaksananya keberhasilan program pengembangan masyarakat lewat 9 konsep komunitas Montagu dan Matson. Penggunaan komunitas sebagai tutor dan katalisator pada masyarakat setempat mampu mengurangi perbedaan persepsi yang mungkin terjadi karena faktor kedekatan. Pendekatan komunitas sebagai tutor dan katalisator program pengembangan masyarakat menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan menekankan upaya pemberdayaan (empowerment) terhadap rakyat menuju kemandirian.

Hadirnya komunitas yang positif pada program pengembangan masyarakat pada dasarnya akan mampu memberikan kontribusi dalam proses pengembangan masyarakat lewat proses difusi inovasi menggunakan teknologi moderen. Oleh sebab itu pengembangan masyarakat seringkali disamakan dengan istilah modernisasi. Salah satu indikator modernisasi adalah hadirnya teknologi informasi komunikasi yang sangat cepat perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi

diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tidak jarang pada akhirnya teknologi informasi dan komunikasi tidak mampu menempatkan manusia sebagai subjek, namun justru menjadi objek teknologi. Ketidakberdayaan individu manusia ketika berhadapan dengan teknologi komunikasi merupakan gambaran dari gagalnya proses pembangunan dan perubahan sosial. Masyarakat seringkali tidak berdaya membendung hegemoni teknologi komunikasi ketika manusia menempatkan dirinya bukan sebagai subyek teknologi tetapi justru menjadi obyek teknologi. Disini peran komunitas dalam sebuah masyarakat untuk mampu masuk dan melakukan pengembangan masyarakat dan memberi pencerahan agar tetap dijalur ptoqram pengembangan masyarakat untuk menciptakan kemandirian sangat dibutuhkan. Tujuan teknologi adalah untuk memudahkan semua hubungan dan informasi serta menekan biaya pengeluaran, diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki bisa memanfaatkan peluang pengembangan masyarakat sebaik-baiknya.

Untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat lewat masyarakat itu sendiri maka peran komunitas masyarakat setempat akan sangat membantu terwujudnya tujuan pengembangan masyarakat tersebut. Untuk menjalankan program tersebut maka komunitas harus memiliki strategi komunikasi. Tujuan Strategi Komunikasi Menurut (Liliweri, 2011: 248) adalah, "... strategi komunikasi berfungsi sebagai cara agar komunikasi yang dilakukan menjadi efektif". Sedangkan tujuan strategi komunikasi dalam proses pengembangan masyarakat adalah untuk:

- a. Memberitahu (Announcing).
- b. Memotivasi (Motivating).
- c. Mendidik (Educating).
- d. Menyebarkan Informasi (Informing).
- e. Mendukung Pembuatan Keputusan (Supporting Decision Making).

Mengingat komunitas adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan sama dan bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut maka komunitas bisa digolongkan dalam kelompok sosial. Komunikasi Sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial, karena itu kegiatan komunikasi sosial adalah lebih intensif daripada komunikasi massa maka komunikasi sosial akan berhasil bila kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini menganggap ada manfaatnya untuk mengadakan kegiatan komunikasi tersebut. Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah-masalah yang dibahas. Selain itu kesadaran dan pengetahuan tentang materi yang dibahas makin meluas dan bertambah. Komunikasi sosial adalah sekaligus suatu proses sosialisasi. Melalui komunikasi sosial, kelangsungan hidup sosial dari suatu kelompok sosial akan terjamin. Melalui komunikasi sosial dicapailah stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh masyarakat.

Komunikasi Sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial, karena itu kegiatan komunikasi sosial lebih intensif daripada komunikasi massa. Komunikasi sosial akan berhasil bila kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini memiliki pemahaman bersama terhadap manfaat kegiatan komunikasi tersebut. Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah-masalah yang kemudian dibahas dalam hubungan formal dan informal. Karena pengembangan masyarakat berarti kita membicarakan perubahan suatu sistem sosial dalam lingkup masyarakat maka pemahaman akan komunikasi sosial akan sangat menentukan keberhasilan dari program tersebut. Untuk itu program pengembangan masyarakat agar tidak menimbulkan rasa kesenjangan dari kelompok masyarakat tersebut akan lebih mudah bila dilakukan lewat pemberdayaan kelompok-kelompok yang tergabung dalam kelompok komunitas di masyarakat.

Selain itu perlu ditumbuhkannya pemahaman, kesadaran dan pengetahuan tentang materi yang pengembangan masyarakat akan sangat membantu kelancaran program pengembangan masyarakat tersebut. Pada dasarnya komunikasi sosial akan mampu mengurangi gesekan atau salah persepsi jika kita menggunakan orang-orang yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka penggunaan komunitas yang dipercaya masyarakat dan dari kalangan masyarakat setempat sangat membantu tercapainya tujuan program pengembangan masyarakat. Melalui komunikasi sosial, kelangsungan hidup suatu kelompok sosial akan terjalin dan terjamin kelangsungannya sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan. Melalui komunikasi sosial dicapai stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh masyarakat.

B. Asset komunitas dalam pengembangan masyarakat.

Asset komunitas merupakan asset yang ada dan dimiliki oleh masyarakat. Setiap wilayah memiliki aset masing-masing, dengan ciri khas dan daya tariknya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk-bentuk asset komunitas, maka perlu dipahami bentuk-bentuk asset komunitas yang ada di dalam suatu masyarakat. Aset komunitas yang melekat dalam pengembangan masyarakat terbagi dalam :

1. Asset Fisik : Fisik merupakan salah satu modal dasar yang terdapat dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Green dan Hines (2002:113) melihat 2 (dua) kelompok utama dari segi fisik yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud disini dapat berupa rumah, perkantoran, pertokoan, gedung perniagaan, dan sebagainya. Sementara itu infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telpon dan sebagainya.
2. Asset Finansial : Finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut. Salah satu indikator yang menggambarkan modal keuangan

masyarakat adalah dengan melihat anggota dan kesiapan antar anggota dalam merespon permasalahan.

3. Asset Lingkungan : Lingkungan dapat juga berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup.
4. Asset Teknologi : Kehadiran teknologi sangat berperan oleh suatu komunitas. Teknologi yang dimaksud terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih seperti komputer, akan tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.
5. Asset Manusia : Kekuatan masyarakat yang menjadi titik tolak berkembangnya suatu negara tidak dapat diragukan lagi terkait dengan unsur manusia yang menjadi modal dasar pembangunan mereka. Modal manusia berbicara mengenai sumber daya manusia yang berada didalamnya serta penguasaan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Manusia memegang peranan penting dalam suatu proses pembangunan. *"The man behind the gun"* menjadi unsur yang penting dibandingkan *"the gun"* itu sendiri.
6. Asset Peran Sosial : Peran sosial memiliki norma dan aturan yang mengikat seluruh anggota komunitas yang berada di dalam, mengatur norma, pola perilaku, kepercayaan (*trust*) serta jaringan (*networking*) antara komunitas dengan lingkungan diluar komunitas ataupun kelompok masyarakat.
7. Asset Peran spiritual dalam proses pembangunan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa fungsi, antara lain untuk :
 - a. Meningkatkan etos kerja.
 - b. Memberikan dorongan spiritual.
 - c. Menjadi petunjuk dan penentu arah langkah.
 - d. Menjadi guardian (pelindung) terhadap penyimpangan.

Pada dasarnya asset komunitas memiliki keterikatan yang erat dengan perkembangan masyarakatnya dalam menangani masalah sosial yang terjadi dilingkungannya, dimana masyarakat didorong untuk mendapatkan peluang yang sama dalam pengembangan diri dan kemampuannya. Unsur pemanfaatan asset sumber daya manusia dan asset sosial dalam program pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan tenaga terampil dikomunitas. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan pelatihan-pelatihan teknik bagi anggota yang sesuai dengan tujuan pengembangan masyarakat siwilayah komunitas tersebut. Sedangkan, untuk asset sosial, program-program pengembangan kemampuan finansial komunitas untuk penanggulangan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan tenaga terampil,

pemberdayaan kemampuan wilayah setempat perlu digali untuk bisa memberi penghasilan dan menghilangkan ketergantungan masyarakat pada bantuan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai gotong royong dilingkungan masyarakat setempat agar terjalin kerjasama yang baik. Disini pelibatan para stakeholder dalam pengembangan asset pengembangan masyarakat dengan komunitas sangat diperlukan untuk memfokuskan pada tujuan yang telah disepakati atau ditentukan antara tujuan program, stakeholder, masyarakat dan peran komunitas yang ada dan mengingat tanggungjawab bersama dalam program pengembangan masyarakat, tidak hanya terbebankan pada salah satu pihak.

C. Bentuk aksi nyata komunitas dalam pengembangan masyarakat

Agar mampu membangun hubungan yang baik dalam komunitas didalam masyarakat ada tiga hal yang perlu dibangun, yakni :

- a. Memberi informasi/nasehat pada masyarakat atas dan bawah.
- b. Membangun keberlangsungan antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah komunitas.
- c. Membangun keberlangsungan antara orang-orang yang berbeda pada level yang sama dalam sebuah komunitas.

Pada dasarnya perlu dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses pembelajaran tertentu dan proses ini tidak akan berjalan tanpa komunikasi (interpersonal) antara penentu kebijakan dengan masyarakat serta sedapat mungkin mampu menggunakan komunitas dalam masyarakat tersebut dalam menyampaikan program dan tujuan pengembangan itu bagi masyarakat serta mempersiapkan menjadi masyarakat yang mandiri.

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan/ pengembangan masyarakat dalam dua hal, yakni :

- a. Suatu upaya yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.
- b. Pemberdayaan adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu peningkatan hidup yang keberlanjutan dalam jangka panjang.

Untuk menggerakkan masyarakat menuju satu tujuan yang telah ditentukan kekuatan diluar kelompok masyarakat tersebut diperlukan program yang jelas dan disusun serta

disosialisasikan dengan jelas pula. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai bidang program pemberdayaan, antara lain :

1. Pemberdayaan politik : Bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara agar masyarakat mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Jal ini diperjelas oleh Utomo yang menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki "quality of work life" yang tinggi dan berorientasi kepada :
 - a) Participation in decision making,
 - b) Career development program,
 - c) Leadership style,
 - d) The degrees of stress experienced by employees, dan
 - e) The culture of the organisation.
2. Pemberdayaan ekonomi : Yakni upaya meningkatkan kemampuan dan daya beli masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam sandang, pangan dan papan.
3. Pemberdayaan sosial-budaya : Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lingkungan sosial melalui human investment untuk meningkatkan hakikat nilai manusia/ human dignity, penggunaan/ human utilization.
4. Pemberdayaan lingkungan, : Program bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditentukan bersama demi meningkatkan hajat hidup lebih baik, mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Dalam hal pengembangan masyarakat, Korten, mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang dapat dikelompokkan dalam empat hal sesuai dengan tingkat kepentingannya, yaitu ;

- a. Relief and welfare : Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Community development/ Small-scale reliant local development : Disini meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur.

Dalam hal ini untuk penyelesaian persoalan masyarakat bawah (grassroot) membutuhkan pendekatan bottom up approach.

- c. Sustainable sistem development : Kepentingan memperhitungkan tujuan pengembangan masyarakat. Pada tahap ini terdapat upaya untuk mempengaruhi

perumusan kebijakan pembangunan. Strategi ini mengharapkan perubahan pada tingkat regional dan nasional.

- d. Kelompok masyarakat atau komunitas yang berperan sebagai tutor atau fasilitator (people movement) : Peran komunitas disini berfungsi membantu masyarakat mengorganisasi diri dan lingkungan, mengidentifikasi kebutuhan lokal serta memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Pada hakikatnya, komunitas (terutama komunitas setempat) akan banyak membantu program pengembangan masyarakat akan mampu mengurangi kesenjangan awal sosialisasi program. Pengakomodiran kebudayaan tradisional seperti semangat gotongroyong, kebudayaan daerah secara sosiologis dan antropologis akan mampu menciptakan ikatan dengan nilai-nilai baru yang disepakati bersama sesuai program yang disampaikan untuk dilakukan secara bersama mencapai perubahan yang disepakati dalam konteks transformasi sosial.

D. Teori Pertukaran Sosial

Berbicara tentang pertukaran sosial maka kita mengenal teori pertukaran sosial (exchange theory) yang merupakan salah satu teori sosiologi yang bernaung dibawah paradigma perilaku sosial (social behaviour paradigm), artinya asumsi-asumsi dan cara berfikir para pengikutnya mengacu pada cara pandang paradigma perilaku sosial tersebut.

George Ritzer dalam menguraikan paradigma ini pada intinya menyebutkan bahwa image of the subject matter atau objek studi paradigma ini bergerak berdasarkan ikatan human behavior. Kalangan behavioris (yaitu orang-orang yang mengikuti cara berpikir paradigma perilaku sosial ini) berusaha untuk mencari dan meramalkan atau memprediksi perilaku sosial yang terjadi sebagai hasil interaksi antara anggota masyarakat (the behaviorist seeks to understand and predict social behavior, oleh karena itu paradigma ini menekankan studinya pada “the way individual responds to certain stimuli” yakni respon individu terhadap stimuli yang dihadapinya. Perlu diketahui juga bahwa paradigma perilaku sosial ini diasumsikan bahwa manusia itu pada dasarnya merupakan makhluk pengejar keuntungan atau yang lebih populer dengan sebutan ganjaran “man is reward seeking human being” (Ritzer, 1980: 195).

Berangkat dari paradikma tersebut maka bisa disimpulkan apabila program pengembangan masyarakat tersebut harus bersumber dari kepentingan masyarakat setempat, disosialisasikan dengan baik pada masyarakat setempat maka tujuan program pengembangan masyarakat akan tercapai. Untuk mengurangi benturan dan kesenjangan yang ada maka akan lebih banyak membantu apabila menggunakan komunitas- komunitas yang bisa diterima masyarakat setempat.

Teori pertukaran sosial ini nampak sangat menekankan pertimbangan untung rugi bagi interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat. Asumsi-asumsi yang mendasari teori pertukaran sosial ini adalah sebagai berikut :

- a. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum akan tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain.
- b. Manusia cenderung berpikir untung rugi.
- c. Manusia cenderung mengembangkan alternatif dalam mencari informasi guna memperhitungkan untung-rugi yang mungkin timbul.
- d. Dalam keterbatasan manusia, mereka tetap berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi dengan manusia lain.
- e. Manusia senantiasa dibatasi oleh sumber daya yang tersedia.
- f. Manusia akan selalu berusaha memperoleh hasil dari wujud material dan non material, misalnya emosi, perasaan suka dan sentimen (Zamroni, 1992: 66)

Usaha pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, komunitas dengan berbagai program dan kebijakannya. Kegiatan pemberdayaan itu merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang kurang beruntung. Program pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi semacam ini akan memberikan peluang besar kepada anggota masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, dan lainnya dalam kehidupan bersama. Ini semua akan memiliki implikasi terhadap peningkatan dan mengubah kemampuan-kemampuan yang dimiliki masyarakat kearah kemajuan yang lebih baik.

Bertitik tolak dari strategi kebijakan di atas, penanganan pemberdayaan masyarakat seyogyanya ditangani oleh tim dari berbagai sektor secara bersama-sama mengajak seluruh komponen membentuk komitmen peduli terhadap perubahan. Melalui komunikasi interpersonal diharapkan potensi-potensi yang ada pada anggota masyarakat dapat dikembangkan sesuai kapasitasnya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Lebih dari itu masing-masing individu dapat membentuk suatu perkumpulan pembelajaran yang memberikan peluang berkembangnya harapan, aspirasi, dan motivasi untuk melakukan perubahan dari pola hidup yang lama menuju pada pola kehidupan yang baru. komponen tersebut membutuhkan interaksi secara timbal balik sehingga menjadi kekuatan daya tahan dalam menangkal segala persoalan. Di samping itu perlu dikembangkan pula kemampuan komunikasi pribadi/interpersonal untuk merumuskan strategi kebijakan, langkah-langkah tindakan, dan evaluasi.

Fungsi komunikasi interpersonal suatu cara untuk mendorong individu-individu secara bersama-sama melakukan pembelajaran secara berkesinambungan. Kemampuan komunikasi interpersonal antar anggota masyarakat secara internal dan eksternal yang menjadi kekuatan terbentuknya jaringan sosial yang diperlukan (W. H. Setyawan, 2016). Dengan mengembangkan potensi komunikasi interpersonal, diharapkan mampu membentuk jaringan sosial, dengan jaringan sosial yang kuat akan terbentuk modal sosial yang dijadikan landasan melakukan komitmen bersama untuk membangun masyarakat. Melalui komunikasi interpersonal diharapkan potensi-potensi yang ada pada anggota masyarakat dapat dikembangkan sesuai kapasitasnya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Terciptanya rasa kemandirian dengan peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat maka dapat memberikan peluang berkembangnya harapan, aspirasi, dan motivasi untuk melakukan perubahan dari pola hidup yang lama menuju pada pola kehidupan yang baru.

E. Intervensi komunitas

Pelaksanaan pengembangan masyarakat memerlukan komunikasi interpersonal yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan program yang telah ditentukan pemerintah lewat perangkatnya. Komunikasi interpersonal dilakukan dalam komunitas dengan melibatkan dua orang atau lebih dan berlangsung secara terus menerus. Komunikasi yang dilakukan secara terus menerus diantara anggota dan berhubungan dengan masyarakat sekitarnya baik secara tatap muka maupun menggunakan jaringan akan membangun keberuntungan tersendiri akan mampu membangun keajegan hubungan antar anggota serta memperkuat ikatan diantara anggota.

Wright dalam Jalaluddin Rakhmat dengan bukunya "*Sosiologi Komunikasi Massa*" mengatakan, type komunikasi ini membawa keuntungan tersendiri dalam membangun ikatan komunitas dengan lingkungan sosialnya : adanya keakraban, fleksibilitas, berhubungan langsung, saling menghormati akan mampu mencapai hasil tanpa membujuk, maksudnya :

- a. Komunikasi antarpribadi memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyampaian dan penerimaan isi pesan.
- b. Kemampuan komunitas untuk melakukan kontak langsung sebagai komunikator pada komunikan akan memudahkan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat tanpa harus membujuk masyarakat untuk menerima gagasan baru.
- c. Hubungan yang langsung dalam komunikasi antarpribadi dapat meningkatkan gagasan dan ganjaran buat penerima pesan atau argumen dan hukuman buat penolaknya.
- d. Pertimbangan dan pandangan orang yang mereka kenal dan mereka hormati akan lebih mudah diterima dibanding komunikator massa yang impersonal maka disini kedudukan dan intervensi komunitas dalam sebuah kelompok sosial sangat penting.

Untuk mencapai keberhasilan intervensi komunitas dalam program pengembangan masyarakat diperlukan suatu sistem komunikasi yang dapat menjalin interaksi secara baik. Sistem

komunikasi itu adalah komunikasi interpersonal yang memiliki makna dan mampu mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan secara efektif yaitu tercapainya pemberdayaan masyarakat. Lewat jenis komunikasi ini diharapkan pesan akan lebih mudah diterima, mudah memahami kebutuhan dan memaui masyarakat setempat, gagasan dilakukan dengan persuasif diharapkan mampu menggerakkan masyarakat (Bito, 2021).

Dalam membangkitkan komunikasi persuasif bisa dimulai dengan kegiatan masing individu mengemukakan keinginan dan problemanya sehingga akan terjadi proses komunikasi yaitu proses komunikasi antar personal atau komunikasi langsung antara individu dengan individu lain, dan disinilah peran intervensi komunitas diharapkan akan mampu menjembatani dan menjadi fasilitator antara masyarakat dan program pengembangan masyarakat.

Intervensi komunitas dalam pengembangan masyarakat sangat penting dilakukan lewat kehidupan bermasyarakat. Intervensi komunitas berfungsi menghantarkan dan memperkuat masyarakat secara aktif dan kreatif dalam mengembangkan diri mereka menuju kehidupan yang sejahtera. Diharapkan lewat perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan, membangun, dan memelihara perubahan yang berkesinambungan. Kebijakan pemberdayaan ini tidak hanya dalam bidang makanan, juga mencakup bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lainnya yang terutama mencakup kebutuhan dasar dan penghidupan merreka selanjutnya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Spicker memberikan arahan kepada para penentu kebijakan mencakup bidang yang relatif luas tawarannya dalam membantu masyarakat dengan tiga kreteria kebijakan sosialnya, yakni :

- a. Kebijakan sosial meskipun bersentuhan dengan bidang makanan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi ia memiliki kesempatan yang menyangkut jaminan sosial.
- b. Kebijakan sosial yang dapat merujuk pada beragam respon kolektif guna mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.
- c. Kebijakan sosial yang dapat menumbuhkembangkan dan menjamin kondisi kesejahteraan masyarakat.

Dalam membangun/memberdayakan masyarakat, diperlukan suatu sistem komunikasi yang dapat menjalin interaksi individu secara baik. Sistem komunikasi itu adalah komunikasi interpersonal yang memiliki makna dan mampu mengarahkan pada pencapaian suatu tujuan secara efektif yaitu tercapainya pemberdayaan masyarakat. Komunikasi interpersonal ini bertujuan mudah menerima, mudah memahami orang lain, lewat pesan/gagasan yang disampaikan dengan persuasif serta mudah menggerakkan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Patub B.N, 2012, *Peran Komunitas Musik Etnik dalam Kebangkitan Budaya Bangsa*, Modul Seminar, Komunitas Suling Bambu Nusantara, Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- AW. Widjaja, 2004, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bito, G. S., Fredy, F., & Setyawan, W. H. (2021). Ethnomathematics: Design of Sabuk Tradisional (Keru) Bajawa as A Learning Media For Elementary School. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 9(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v9i1.9835>
- Cangara, Hafied. 2013, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Clifford Geertz, 1992. *The Interpretation of Culture : Selected Essays*, London, 1914, versi Indonesia, *Tafsir Kebudayaan*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Daniel Teguh Kurniawan. 2013. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. vol. 8, no. 1, hh 126-139.
- Deddy Mulyana, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Rosda Karya, Bandung.
- Hamad I, 2005. Strategi Komunikasi untuk Menyukseskan Program Investasi Sosial. Dalam buku *Investasi Sosial*, Suspensos, Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Priyatna, 2016. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pengukuran Keberdayaan Komunitas Lokal*.
- Rubin, Allen and Earl R. Babbie, 2008, *Research Methods for Social Work*, Thomson Brooks/Cole, Belmont.
- Rulli Nasrullah, 2012, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*, Kencana, Jakarta.
- Setyawan, W. H. (2016). IMPLEMENTING THE DISTANCE TRAINING FOR ENGLISH PRIMARY TEACHER IN KEDIRI. *Jurnal TEKPEN*, 1(1).
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jtp/article/view/1140>
- Setyawan, W. (2020). Qualified Lecturers Must Update By Educational Technology. In *Initiative of Thoughts from Indonesia to the World of the Covid 19 era* (pp. 175–181). novateurpublication. <https://novateurpublication.com/wp-content/uploads/2020/09/28.-WAWAN-HERRY-SETYAWAN.pdf>

Sutaryo, 2005, *Sosiologi Komunikasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Thomson, Neil, 2005, *Understanding Social Work*. Palgrave, London.

Wright, Charles R., 1986, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, Remaja Rosda Karya, Bandung.

BIODATA PENULIS

Nurtyasih Wibawanti Ratna Amina, M.Si. Konsisten di Ilmu Komunikasi, Saat ini menjadi dosen di **Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS)**. Sesuai dengan bidang keilmuan, konsentrasi mengajar dibidang digital Journalism dan Broadcasting. Pengampu matakuliah praktikum Jurnalistik dan Broadcasting. Sejak tahun 2018 sampai sekarang aktif di kegiatan pelatihan & sosialisasi UMKM, kelompok masyarakat dan relawan. Tergabung dibeberapa kegiatan kemasyarakatan dan pemerhati pendidikan politik.

BAB 7

Kendala dalam pengembangan komunitas masyarakat

Memahami konsep komunitas, sebelum membahas kendala yang dihadapi dalam pengembangan komunitas, maka konsep komunitas perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan komunitas?. Komunitas dapat diartikan sebagai adanya sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Komunitas juga dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dari suatu masyarakat atau sebagai sekelompok orang yang hidup di suatu area khusus, memiliki karakteristik budaya yang sama.

Kata *community* menurut Syahyuti adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Cum*” yang mengandung arti *together* (kebersamaan) dan “*Munus*”, yang bermakna *the gift* (memberi) antara satu sama lain. Maka dapat diartikan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung antara satu sama lain. Iriantara (2004) mendefinisikan makna komunitas adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Sedangkan menurut Wenger (2004) komunitas itu adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian dengan saling berinteraksi secara terus-menerus. Selain itu, pengertian komunitas ada yang mengacu pada orang berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama yang khusus, seperti para pedagang kaki lima, pedagang pasar, kelompok ojek Online dan lain sebagainya. Secara khusus, komunitas menunjuk pada satu kategori manusia yang berhubungan satu sama lain karena didasarkan pada lokalitas tertentu yang sama karena kesamaan lokalisi itu secara tidak langsung membuat kelompok tersebut mengacu pada kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Komunitas juga dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dari suatu masyarakat atau sebagai sekelompok orang yang hidup di suatu area khusus yang memiliki karakteristik budaya yang sama.

Dari banyak definisi yang telah disampaikan, komunitas pasti memiliki sifat interaksi. Interaksi yang ditekankan lebih kepada interaksi informal dan spontan dari pada interaksi formal dan struktural, serta memiliki orientasi yang jelas. Ciri utama sebuah komunitas adalah adanya keharmonisan, egalitarian serta sikap saling berbagi nilai dan kehidupan.

Menurut Etienne Wenger (2002). Komunitas mempunyai berbagai macam bentuk dan karakteristik, diantaranya:

1. Besar atau kecil

Keanggotaan di beberapa komunitas ada yang hanya terdiri dari beberapa anggota saja dan ada yang mencapai ribuan anggota. Banyak atau sedikitnya anggota pada suatu komunitas tidak menjadi masalah, meskipun demikian komunitas yang memiliki banyak anggota biasanya dibagi menjadi sub divisi berdasarkan wilayah sub tertentu.

2. Terpusat atau Tersebar

Sebagian besar suatu komunitas berawal dari sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama atau memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Sesama anggota komunitas saling berinteraksi secara tetap serta ada beberapa komunitas yang tersebar di berbagai wilayah.

3. Berumur panjang atau berumur pendek

Sebuah komunitas untuk menjadi berkembang seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan jangka waktu keberadaan sebuah komunitas sangat beragam. Beberapa komunitas dapat bertahan dalam jangka yang sangat lama, tetapi ada pula komunitas yang hanya berumur pendek.

4. Internal atau Eksternal

Sebuah komunitas dapat bertahan sepenuhnya dalam unit bisnis atau bekerjasama dengan organisasi yang berbeda. Keberlanjutan eksistensi sebuah komunitas sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, internal dalam komunitas itu sendiri diantara anggota atau juga dari faktor eksternal yang melingkupi keberadaan komunitas tersebut.

5. Homogen atau Heterogen

Komunitas dapat berasal dari anggota dengan latar belakang yang relatif sama dan juga dapat terbentuk dari anggota dengan latar belakang yang berbeda. Pada umumnya jika sebuah komunitas berasal dari latar belakang yang sama komunikasi akan lebih mudah terjalin komunikasi yang harmonis, intimasi dan kesamaan pandangan dan akan berlanjut pada berkembangnya komunitas tersebut. Demikian pula sebaliknya jika komunitas terdiri dari anggota yang berlatar belakang berbeda-beda, maka sangat diperlukan rasa saling menghargai dan rasa toleransi yang cukup besar satu sama lain.

6. Spontan atau Disengaja

Beberapa komunitas ada yang berdiri tanpa adanya intervensi atau usaha pengembangan dari suatu organisasi atau pihak lain yang berkepentingan terhadap tumbuh dan berkembangnya komunitas tersebut. Para anggota secara spontan berinisiatif bergabung untuk membentuk kelompok atau komunitas karena kebutuhan seperti berbagi informasi dan memiliki minat yang relatif sama. Pada beberapa kasus, terdapat komunitas yang secara sengaja didirikan dengan spontan atau disengaja tidak menghiraukan keformalan dari komunitas yang didirikan.

7. Tidak dikenal atau Dibawah sebuah institusi

Sebuah komunitas dapat memiliki berbagai macam hubungan dengan organisasi atau kelembagaan lain. Akan tetapi juga banyak terdapat komunitas yang tidak dikenali, hal ini dikarenakan komunitas tidak berdiri dibawah naungan sebuah institusi lain yang sudah lebih mapan keberadaannya.

Secara anatomi komunitas merupakan kombinasi dari 3 unsur utama, yaitu:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan dasar yang mengidentifikasi sebuah komunitas. Selain itu ruang lingkup mengilhami anggota komunitas untuk berbagi pengetahuan, bagaimana mengemukakan ide atau gagasan dan menentukan tindakan atau cara melaksakannya. Tanpa ruang lingkup maka sebuah komunitas hanya merupakan sekumpulan orang yang tidak memiliki arah dan tujuan sama, sehingga komunitas akan menjadi suatu yang sia-sia.

2. Anggota

Anggota merupakan sekumpulan orang yang berinteraksi untuk belajar, membangun sebuah hubungan, kebersamaan dan tanggung jawab. Setiap individu mempunyai karakter yang berbeda, sehingga menciptakan keanekaragaman dalam suatu komunitas. Keberhasilan sebuah komunitas bergantung pada kekuatan dari setiap anggota dari komunitas itu sendiri. Jika sebuah komunitas memiliki anggota yang kuat maka dapat membantu meningkatkan interaksi dan hubungan yang didasari oleh saling menghargai, saling menghormati dan saling percaya.

3. Praktis

Praktis adalah merupakan sekumpulan kerangka, ide, alat, informasi, gaya bahasa, sejarah dan dokumen yang dibagi sesama anggota komunitas. Jika ruang lingkup merupakan fokus dari sebuah komunitas, maka praktis adalah merupakan pengetahuan spesifik yang dikembangkan, disebarkan dan dipertahankan pada sebuah komunitas. Keberhasilan praktis bergantung dari keseimbangan antara gabungan aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut seperti dokumen, SOP (Standar Operasional Prosedur) atau sarana dan prasana yang dibutuhkan.

Komunitas baik yang dibentuk oleh keinginan dari masyarakat sendiri ataupun yang diintrodusir dan dibentuk oleh pihak lain dalam pengembangannya akan menghadapi kendala yang beraneka ragam. Secara sistematis kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan komunitas dapat diringkas menjadi tujuh permasalahan sebagai berikut:

1. Komitmen yang rendah

Powell (1983) mendefinisikan bahwa komitmen merupakan suatu disposisi untuk melibatkan diri ke dalam apapun yang diikuti dan tidak ada keinginan untuk menyendiri. Pada definisi yang dikemukakan Powell ini dapat dikatakan bahwa komitmen merekomendasi atau menyetujui posisi seseorang terhadap sebuah kebersamaan, baik itu merupakan organisasi formal maupun kebersamaan dalam bentuk perkumpulan yang lebih

longgar. Bagi setiap anggota ada dorongan untuk kebersamaan atau dengan kata lain anggota tidak ingin keluar dari kebersamaan.

De Porter dan Hernacki (2000) menyatakan bahwa komitmen adalah tekad yang kuat, yang mendorong seseorang untuk mewujudkan yang dicita-citakan, terlepas dari beberapa rintangan yang mungkin dihadapi. Definisi ini menunjukkan bahwa komitmen memberikan konsekuensi bagi seseorang untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan tindakan pada sebuah kebersamaan. Sebuah permasalahan yang mungkin dihadapi dalam sebuah kebersamaan akan menuntut kepada orang-orang yang ada didalam kebersamaan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini komitmen dari setiap anggota akan menjadi solusi bersama.

Koontz dan Wehrich (1988) mengatakan bahwa prinsip komitmen adalah perencanaan logis terhadap masa depan yang harus dilaksanakan melalui serangkaian tindakan. Komitmen selalu terkait erat dengan keputusan yang dibuat hari ini. Dengan perkataan, suatu keputusan dapat menjadi suatu komitmen, keputusan bisa terkait uang, tujuan tindakan atau reputasi.

Rendahnya Komitmen dari anggota komunitas dapat mengakibatkan resiko terhadap keberlangsungan keberadaan komunitas tersebut. Komunitas dibuat atau didirikan tentu mempunyai tujuan yang mulai, untuk kebaikan masyarakat, namun demikian peluang keberhasilan maupun kegagalan boleh dikata sama-sama bisa terjadi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan komunitas di tengah masyarakat adalah komitmen yang rendah dari masyarakat anggota komunitas itu sendiri.

Komitmen yang rendah dari masyarakat anggota komunitas bisa dipicu oleh terbatasnya pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap visi, misi dan tujuan dibentuknya komunitas tersebut. Oleh karena itu pemahaman terhadap visi, misi dan tujuan komunitas harus secara masif selalu disosialisasikan kepada anggota komunitas agar dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi agar keberhasilan dalam pengembangan komunitas lebih bisa diharapkan.

2. Etos kerja yang rendah

Etos Kerja, secara etimologi, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan termasuk berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan atau perilaku suatu kelompok masyarakat. Menurut (Sinamo, 2011), menyatakan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Sehingga dikatakan bahwa etos kerja berkaitan erat dengan budaya kerja dalam sebuah organisasi.

Demikian dengan (Darodjat, 2015), menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan seseorang atau sekelompok

orang, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Jadi dapat dikatakan bahwa etos kerja merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan karakter pribadi yang dapat memberikan pengaruh kepada dirinya sendiri baik itu pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif yang dapat meyakinkan diri untuk dapat memberikan kontribusi kebaikan.

Dimensi Etos kerja menurut (Sule dan Priansa, 2018), bahwa etos memiliki fungsi yang sangat penting, baik untuk individu karyawan maupun organisasi tempatnya bekerja. Sejumlah penting dari etos kerja bagi individu karyawan itu sendiri antara lain: etos menunjang kepribadian, etos menunjang profesionalisme, etos menunjang karir, etos menunjang pergaulan, etos menunjang keberhasilan kepemimpinan. Sedangkan (Anoraga dan Prasetyo, 2015), memaparkan dimensi etos kerja adalah sebagai berikut: aspek dari dalam diri individu, aspek motif sosial, dan aspek persepsi. Dengan demikian dikatakan bahwa dalam mengukur etos kerja individu dibutuhkan dimensi yang jelas sebagai dasar menggambarkan karakter dan nilai seseorang yang dapat memengaruhi diri seseorang dalam suatu organisasi dan lingkungan. Faktor yang memengaruhi Etos Kerja, dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi, maka suatu instansi/perusahaan harus memperlihatkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi etos kerja karyawan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Menurut (Sule and Priansa, 2018), faktor-faktor internal yang secara umum memengaruhi etos kerja karyawan adalah: agama, pendidikan, motivasi, usia, jenis kelamin, budaya, sosial politik, geografis, struktur ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan perkembangan bangsa lain. Adapun (Sinamo, 2011), mengatakan bahwa yang memengaruhi etos kerja adalah: faktor internal (motivasi dan faktor internal dalam diri inividu), serta budaya yang ada dalam masyarakat. Maka untuk mendorong etos kerja individu, baik individu atau manajemen perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Etos kerja karyawan adalah seberapa tinggi semangat yang dimiliki seorang karyawan dalam bekerja. Tidak hanya untuk mencapai target pekerjaan sendiri saja, tetapi juga target tim atau organisasi. Tinggi rendahnya etos kerja karyawan menjadi penilaian atasan. Dengan etos kerja yang tinggi, seseorang akan dianggap produktif, mampu, dan semangat dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan. Hal ini yang akan membedakan antara satu karyawan dengan karyawan lain. Etos kerja akan membawa pada kesuksesan. Mulai dari naik gaji, promosi jabatan, sampai bonus maupun keuntungan lain. Oleh karena itu, etos kerja harus selalu dipertahankan agar karier semakin baik.

Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki etos kerja yang tinggi atau tidak, dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1). Tipikal karyawan yang inisiatif, perusahaan tidak pernah memaksa karyawan untuk melakukan hal-hal tertentu, tetapi, perusahaan selalu berharap agar seseorang punya inisiatif dalam bekerja sehingga dapat memberi kontribusi lebih kepada perusahaan. Perusahaan juga tidak meminta seseorang memberikan ide atau gagasan pada saat rapat, namun seseorang perlu berinisiatif memberikan pemikiran terbaik demi kemajuan perusahaan; 2). Dapat bekerja sama dengan tim, pada kenyataannya

tidak semua karyawan mampu bekerja sama dalam tim. Beberapa di antaranya justru lebih bagus bila jadi bekerja sendiri. Bila diajak berkolaborasi atau bekerja dalam sebuah tim, hasil kerjanya kurang maksimal. Etos kerja ditunjukkan dari cara membangun komunikasi dengan rekan kerja yang lain, terutama dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian apa yang dikerjakan seseorang adalah bukan untuk kebaikan diri sendiri, akan tetapi kebaikan Bersama; 3). Bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan.

Apakah seseorang bersedia menjadi karyawan yang maju?, kembali kepada pilihan masing-masing karyawan itu sendiri. Jika seorang karyawan ingin memiliki etos kerja yang baik dan meningkat, maka mutlak bagi karyawan tersebut bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik pada apa yang dikerjakan.

3. Koordinasi yang lemah

Pengertian koordinasi, kata koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* (Harianto 2020). Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha: 2003). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semua dapat terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003). Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Para pimpinan membagi kerja kedalam fungsi-fungsi atau departemen-departemen khusus untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi organisasi mereka. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas pengkomunikasian yang tepat, maka setiap individu akan dengan semangat dalam menyelesaikan tugas. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu pegawai, tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syauqi: 2019) menyimpulkan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Koordinasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan komunitas. Komunitas didirikan pasti mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama diantara anggota komunitas itu sendiri. Keberhasilan komunitas dalam mewujudkan cita-cita kebaikan akan sangat mempengaruhi pengembangan sebuah komunitas, sehingga kebutuhan koordinasi yang baik akan menjadi keniscayaan untuk pengembangan dan keberlangsungan sebuah komunitas.

4. Diversifikasi pola kehidupan

Pada umumnya kata diversifikasi banyak digunakan pada dunia bisnis, seperti kata diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah merupakan salah

satu strategi yang penting dalam meningkatkan volume penjualan. Berikut pengertian diversifikasi yang digunakan dalam dunia bisnis menurut (Kotler: 2009) seorang pakar bidang pemasaran menyatakan bahwa konsep diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Sedangkan (Tjiptono: 1997) mengemukakan definisi dari diversifikasi produk yaitu upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas.

Diversifikasi masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglobal). Diversifikasi pola kehidupan dapat diartikan bentuk-bentuk kehidupan yang dijalani masyarakat, merupakan sebuah keniscayaan bahwa semakin heterogen maka tentu akan menjadi semakin tidak efisien dalam pengelolaan sebuah komunitas atau institusi. Dengan demikian apabila sebuah komunitas dengan tingkat diversifitas yang tinggi akan menjadi tidak efisien dalam pengembangan komunitas tersebut. Dan sebaliknya semakin homogen sebuah komunitas akan lebih efektif dan efisien dalam pengembangannya.

5. Proses monitoring dan evaluasi yang rendah

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Tujuan monitoring adalah untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>)

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan evaluasi adalah untuk: 1). Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; 2). Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan seberapa besar manfaat dari suatu kebijakan; 3). Mengukur tingkat keluaran, mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan; 4). Mengukur dampak suatu kebijakan, dengan evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negative; 5). Mengetahui apabila terjadi penyimpangan, untuk mengetahui bila terjadi penyimpangan, dapat diketahui dengan cara

membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; 6). Dijadikan Sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang, untuk memberikan masukan bagi proses penyusunan kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang sehingga dihasilkan kebijakan yang lebih baik. (<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>)

Sebuah institusi ataupun juga komunitas dalam perjalanan pelaksanaan program kerja tentu membutuhkan monitoring dan juga evaluasi. Kebutuhan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita bersama tentu diperlukan monitoring agar diketahui perkembangan program yang dilaksanakan, setelah dimonitoring dilaksanakan tentu dibutuhkan langkah berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan agar dapat diketahui seberapa berhasil program kerja atau harapan-harapan dapat direalisasikan, dan langkah apa saja yang harus diambil sebagai tindakan nyata untuk mewujudkan cita-cita atau harapan dari institusi atau komunitas tersebut.

6. Perumusan indikator capaian yang lemah.

Indikator adalah bagian dari cara mendapatkan nilai, dengan wujud ciri-ciri atau ringkasan. Pengertian indikator adalah sesuatu yang bisa memberikan keterangan. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menjelaskan bahwa pengertian indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Keterangan yang didapat dari indikator bisa bermacam-macam. Keterangan yang diberikan indikator tergantung pada jenis indikator apa yang digunakan untuk membaca. Contoh paling mudah dipahami dari pengertian indikator adalah indikator untuk membedakan antara orang yang berkomitmen tinggi dengan orang yang tidak punya komitmen. Hal yang sama ditegaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*). Menurut WHO, pengertian indikator adalah suatu variabel yang dapat membantu seseorang dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. (<https://hot.liputan6.com/read/4850741/pengertian-indikator-adalah-sesuatu-yang-bisa-memberikan-keterangan>)

Indikator capaian dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah komunitas haruslah memiliki ukuran yang definitif, sehingga keberhasilan dalam mencapai indikator yang diinginkan dapat diukur dengan jelas. Komunitas yang tidak dapat merumuskan cita-cita dengan indikator yang jelas, tentu akan mengalami hambatan dalam pengembangan dari keberadaan komunitas itu sendiri, oleh karena itu indikator capaian harus dapat dirumuskan dengan jelas.

Administrasi yang birokratis

Menurut (Alemina Henuk-Kacaribu: 2020), secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *administrare*, berarti melayani atau membantu. Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala sesuatu, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak

bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih.

Pengertian administrasi dalam arti sempit (Hendi Haryadi: 2009), bahwa administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis, untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk mendapat informasi. Pengertian administrasi dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerja sama sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja, sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Salah satu pengertian birokrasi menurut KBBI adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan, yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Dari definisi tersebut, terdapat konotasi yang kurang baik terhadap birokrasi. Masyarakat sering beranggapan jika berurusan dengan birokrasi pemerintahan akan berbelit-belit, lamban dan tidak nyaman. Hal ini tidak lepas dari asal mula timbulnya birokrasi.

Kata birokrasi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *buerau* artinya meja dan *kratia* artinya aturan. Jadi arti harfiah birokrasi adalah orang yang bekerja di meja dengan aturan yang ketat. Pada awalnya, birokrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk para pejabat, yang melayani raja atau penguasa bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Maka karakter birokrasi terkesan feodal. Hal ini juga mempengaruhi birokrasi di Indonesia, di mana sebelum Indonesia merdeka, banyak kerajaan di Nusantara.

Namun konsep birokrasi tersebut “disingkirkan” oleh Max Weber, yang dikenal sebagai Bapak Birokrasi Modern, dengan memperkenalkan konsep Birokrasi Rasional. Max Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern. Birokrasi dibentuk karena adanya negara yang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh sebab itu, birokrat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pada saat sekarang ini telah terjadi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, sudah pasti tuntutan masyarakat atas layanan birokrasi negara yang cepat, tepat dan bebas dari KKN, dibutuhkan birokrat yang tidak birokratis, yaitu birokrat yang bekerja secara efektif, efisien, proaktif, profesional dan berintegritas sehingga masyarakat dapat layanan lebih baik. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13251/Birokrat-Tapi-Tidak-Birokratis.html>)

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Birokrasi adalah susunan

tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Tekait dengan administrasi yang birokratis merupakan penghambat atau kendala pengembangan komunitas, dapat jelaskan bahwa apabila komunitas dalam proses pengelolaan administrasi berjalan lamban, tidak efektif dan juga tidak efisien, atau dapat dikatakan bersifat birokratis, maka hal ini tentu akan berdampak kurang baik dan akan menjadi penghambat pengembangan dari komunitas. Dengan demikian para pihak yang berkepentingan dengan komunitas harus selalu berupaya dan memperhatikan pola admistrasi yang dilaksanakan jangan sampai bersifat birokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, B. and Prasetyo, A. (2015) 'Motivasi Kerja Islam dan Etos Kerja Islam Karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(7), p.531. [doi: 10.20473/vol2iss20157pp531-541](https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp531-541).
- Darodjat, T. A. (2015) *Kini., Konsep-Konsep Dasar Manajemen Personalia-Masa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harianto, G. P., Rusijono, R., Masitoh, S., & Setyawan, W. H. (2020). Collaborative-Cooperative Learning Model to Improve Theology Students' characters: Is it Effective? *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(2). <https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.31272>
- Herry Setyawan, W., Budiman, A., Septa Wihara, D., Setyarini, T., & Nurdyansyah, R. (2019). R., & Barid Nizarudin Wajdi, M.(2019). The effect of an android-based application on T-Mobile learning model to improve students' listening competence. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1175/1/012217/pdf>
- Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga.2009)
- Koontz, Harold and Wehrich, Heinz, 1988. *Intisari Manajemen*. Alih bahasa A. Hasyini Ali. Jakarta: Bina aksara.
- Sinamo, J. (2011) *8 Etos Kerja Profesional*. Jakarta: Institut Dharma Mahardika.
- Sule, E. T. and Priansa, D. J. (2018) *Kepemimpinan dan perilaku organisasi : (membangun organisasi unggul di era perubahan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarauw, J. S. and Timbuleng, S. (2015) 'ETOS KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT HASJRAT ABADI CABANG MANADO', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2). doi:[10.35794/emba.v3i2.9284](https://doi.org/10.35794/emba.v3i2.9284).
- Setyawan, W. H., & Dewi, E. N. (2022). Parental involvement and Educational facilities on Student's achievement through learning motivation as moderator variable, Is it Effective?. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v6i1.1565>
- Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Edisi Ke-3, (Yogyakarta: ANDI, 1997) ISSN (e): 2527–564X / ISSN (p) 2621-0746. Website Journal: <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>. *Jurnal Renaissance | Volume 4 No. 02| Agustus 2019*, hlm: 551-559.

PENULIS

Muchtar, lahir di Kabupaten Pekalongan, 21 September 1959, menempuh pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan di Universitas Darul Ulum lulus pada tahun 1989. Pada tahun 1993 melanjutkan ke Pascasarjan S2 Intitut Pertanian Bogor pada program studi PWD (Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan) lulus pada tahun 1997. Pada tahun 2002 mengambil Studi Lanjut S3 Ilmu Ekonomi Pembangunan di Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang lulus pada tahun 2007. Aktif menjadi dosen di fakultas ekonomi Universitas Darul Ulum sejak tahun 1989 sampai sekarang, pada saat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi untuk periode kedua.

BAB 8

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

A. Makna Pendamping Desa

Istilah pendamping berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pendamping adalah (orang) yang mendampingi (dalam perundingan dan sebagainya). Pendamping berasal dari kata dasar damping.

Menurut (Deptan, 2004) pendampingan adalah kegiatan atau upaya dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Menurut (Setianingsih, 2019) pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Pendamping Desa menurut Permendesda no. 3 Tahun 2015 adalah Tenaga pendamping profesional bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Desa atau sebutan lainnya yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat yang berbeda disetiap wilayah yang bertujuan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dibawah naungan perwakilan masing-masing yang menjadi pendamping dalam memajukan suatu Desa. Seperti misalnya ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun hingga Kepala Desa. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nomina (kata benda) yang berarti:

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
- b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- c. Kl tempat, tanah, daerah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Beberapa pengertian Desa menurut para ahli antara lain sebagai berikut :

- a) Menurut R. Bintarto, dalam (Runa, 2013) desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural atau budaya yang terdapat disuatu daerah yang memiliki hubungan tolong-menolong yang masih sangat erat.
- b) Menurut Rifhi Siddiq, dalam Heckman et al., (1967) desa adalah suatu wilayah yang sudah rendah hunian penduduk atau sepi dibandingkan dengan hunian penduduk diperkotaan dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, dan memiliki mata pencaharian utama yaitu di bidang agraris yaitu sebagai petani serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
- c) Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri

Desa (atau sebutan lain: gampong, nagari, kampong, marga, dan sebagainya) sering kali dipandang sebagai sesuatu yang terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendamping Desa merupakan seseorang yang terpilih dan mampu berperan aktif sekaligus memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjadi sebagai fasilitator, komunikator dan juga konsultan bagi semua masyarakatnya (Setyawan, 2022). Rekrutmen pendamping desa ini dilakukan secara terbuka dan dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Rekrutmen tersebut dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

Calon tenaga pendamping desa harus memiliki sifat yang profesional dan kompeten. Kompetensi yang harus dimiliki pendamping Desa minimal harus memenuhi unsur kualifikasi berikut:

1. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
2. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
3. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
4. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
5. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Biasanya pendamping merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada (Herry, 2019). selain itu juga memiliki tujuan untuk merujuk kehidupan yang lebih layak pada masyarakat di suatu Desa. Hal yang perlu dikembangkan dan digali dalam konteks ini adalah potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pendamping Desa sangat menentukan keberhasilan dari permasalahan yang ada pada Desa, seperti misalnya masalah tentang kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dalam program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Di negara yang berkembang seperti Indonesia, hal yang utama di perhatikan adalah hal pembangunan di sektor industri. Sehingga akibatnya di sektor lain kurang diperhatikan, seperti misalnya sektor pertanian yang ada di pedesaan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pedesaan menjadi dikorbankan, karena pembangunan hanya terfokus pada sebuah perkotaan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping desa ini antara lain yaitu meningkatkan dalam tingkat pemberdayaan masyarakat dengan cara asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa. Pengorganisasian yang dimaksud dalam hal pendamping desa ini misalnya seperti perkumpulan remaja-remaja atau yang biasa disebut dengan Karang Taruna. Mereka dibimbing dan diberi arahan untuk dapat membantu dalam pengembangan desa. Selain itu perkumpulan ibu-ibu PKK yang membantu dalam pemberdayaan perempuan Desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dengan cara musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pendamping desa harus mampu mengayomi seluruh masyarakatnya dan harus berperilaku adil terhadap semua masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan rasa iri dengki antar masyarakat desa dalam suatu desa. Pendamping desa ini di atur secara resmi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9. Dengan adanya pendamping Desa ini diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dan mampu menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera.

Disisi lain Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya aura yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, berperan aktif juga dalam mengupayakan pembangunan dan kemajuan di pedesaan. Dengan harapan masyarakat di pedesaan mampu bersaing, sehingga diharapkan mampu mmeberikan solusi yang terbaik untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat pedesaan. Pendamping desa tidak

hanya memberikan perubahan secara fisik saja yang dapat terlihat mata namun, pendamping desa juga diharapkan mampu memberikan pembangunan yang secara non fisik. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam perubahan pembangunan disuatu wilayah. Sumber daya manusia juga bisa menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa. Pendamping desa juga harus mampu dalam pembentukan karakter masyarakat, karena Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama dalam pengembangan suatu pembangunan pedesaan yang lebih baik kedepannya.

B. Peran dan Fungsi Pendamping Desa

Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.

Peran krusial pendamping desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa dan Peraturan Menteri Tentang Pendamping Desa. Pengalaman selama ini menunjukkan, pendamping desa mampu mendinamisasi desa baik dalam konteks diskursus dan praksis. Aktivis LSM, akademisi serta pekerja desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. Dengan hadirnya kebijakan penempatan pendamping desa sebagai amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka hadirilah peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa yang membahas mengenai pendamping desa termasuk di dalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama pendamping desa. Oleh karena itu para pendamping desa harus mampu memahami apa yang menjadi tujuan dari pendampingan mereka dan harus memahami apa yang menjadi amanat dalam Undang. Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seorang pendamping desa harus terus melakukan inofasi pendampingan bagi masyarakat dan pemerintah desa agar peran pendamping desa ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Menurut Soekanto (2003) “Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:”

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat sebagai berikut:
 - a) Mendampingi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa peran pendamping Desa secara umum sebagai berikut :

1. Pendamping desa memiliki peranan yang penting di desa, yaitu: sebagai fasilitator dalam hal ini pendamping desa sbg fasilitator yang berarti memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing2 individu.
2. Motivator, Pendamping desa berperan menjadi motivator yang berarti pendamping desa berperan menjadi penyemangat bagi masyarakat yang akan mengembangkan potensinya untuk memajukan menuju kehidupan yang lebih baik.
3. Membantu Aparatur Pemerintahan Desa, Peran pendamping desa dalam hal ini menjadi pembantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan desa
4. Mengawal Pengelolaan Dana Desa, Peran pendamping desa dalam pengelolaan dana yaitu menjadi amanah bagi masyarakat lainnya untuk mengumpulkan dana2 yang berhubungan dengan desa
5. Menemukan Potensi Desa, Peran pendamping dalam menemukan potensi desa yaitu dengan cara menggali potensi yang ada di wilayah tersebut, seperti misalnya mengembangkan tempat wisata yang ada.
6. Pembangunan Desa, Peran pendamping desa dalam hal ini menjadi fasilitator masyarakat desa dalam pembangunan seperti misalnya pembangunan jalan yang rusak yang ada pada daerah tersebut.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya.

Peran pendamping desa dalam menjalankan tugas pendampingan bagi aparat pemerintah desa. Pendampingan yang dilakukan dalam hal pengawasan serta fasilitator kegiatan pembangunan

desa. Memantau dan turut membantu aparat pemerintah desa dalam menyelesaikan rencana pengalokasian dana program kerja desa. Maka dari itu peran pendampingan yang dilakukan pendamping desa bagi pemerintah desa akan diketahui hasilnya melalui pendeskripsian sejauh mana pendamping desa dapat mengefektifkan perannya dalam mendampingi proses pemerintahan desa. Sehingga pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat membantu masyarakat menjadikan percepatan pembangunan desa ini menjadi suatu hal yang nyata.

C. Tujuan Pendamping Desa

Tujuan dari sebuah pendampingan adalah terciptanya sebuah pemberdayaan. Untuk pemberdayaan sendiri merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada diri individu. Hal itu terjadi guna meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dalam berbagai hal yang dimiliki oleh sumber daya manusia guna membela diri pendamping masing-masing. Dasarnya tujuan pendampingan sesuai dengan panduan Wiryasaputra dalam bukunya yang berjudul *Ready To Care: Pendampingan dan Konseling Psikoterapi* yaitu :

1. Mengubah Masyarakat Menuju Pertumbuhan

Mengubah masyarakat menuju pertumbuhan seperti misalnya mengadakan sosialisasi dan menerapkannya, sehingga masyarakat mampu mengubah pola pikir dan akan membawa ke arah pertumbuhan.

2. Membantu Masyarakat Mencapai Pemahaman Diri Secara Penuh dan Utuh

Membantu memberikan pemahaman tentang suatu persoalan yang ada di lingkup Desa sehingga nantinya masyarakat akan mengetahui dan memahami permasalahan yang ada

3. Membantu Masyarakat Agar dapat Berkomunikasi dengan Lebih Sehat

Membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan sehat misalnya dengan cara sering-sering mengadakan musyawarah, dengan begitu masyarakat akan mampu mengemukakan pendapatnya di depan umum. Tidak hanya berbicara dibelangan saja, namun mereka mampu dan berani menyampaikannya.

4. Membantu Masyarakat untuk Bertingkah Laku Baru yang Lebih Sehat

Membantu masyarakat bertingkah sehat seperti misalnya, melarang para pemuda untuk tidak mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di lingkungan gang kecil atau lingkungan yang banyak anak kecilnya. Selain itu juga akan membrikan saksi bagi siapapun yang melarangnya. Dengan begitu para pemuda pelan-pelan akan terbentuk

5. Membantu Masyarakat Agar Belajar Mengungkapkan Diri Secara Penuh dan Utuh

Membantu masyarakat untuk mampu mengeluarkan pendapatnya ketika dilakukannya musyawarah Desa.

6. Membantu Masyarakat Agar dapat Bertahan

Membantu masyarakat untuk bertahan, yaitu dengan dimulai hal kecil yaitu dengan cara menggali potensi masyarakat sekitar dan mengembangkannya. Dengan begitu masyarakat tersebut akan betah dan tidak mempunyai keinginan untuk pindah dari daerah tersebut. Karena mereka akan merasakan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang tetap (Budiman, 2021).

7. Membantu Masyarakat untuk Menghilangkan Gejala-Gejala yang dapat Membantunya Menjadi Disfungsional.

Membantu menghilangkan rasa-rasa Disfungsional, dengan cara menggali

Pendamping Desa juga menjalani beberapa tugas, meliputi:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti misalnya, membuat perencanaan tentang perbaikan jalan yang rusak guna untuk memperbaiki fasilitas yang digunakan oleh masyarakat Desa.
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan pendampingan Desa sesuai dengan yang telah terkandung dalam substansi UU Desa serta Permendes No 3 Tahun 2015 berikut ini:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Tujuan ini memiliki arti yaitu memberikan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas yang lebih terhadap masyarakat dengan harapan mampu dikembangkan dan menuju perubahan yang lebih baik lagi kedepannya.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan kesadaran ini dimulai dengan hal yang sederhana seperti misalnya, mengadakan kerja bakti atau gotong royong antar sesama warga, dan membuat denda jika ada yang berhalangan hadir dengan begitu nantinya akan otomatis terpanggil dan ikut partisipasi dalam hal ini.
- d. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.

Meningkatkan sinergi ini dapat dilakukan dengan cara seperti misalnya saling mensupport antar warga masyarakat yang berbeda sekto mata pencaharian. Seperti misalnya antara sekto pertanian dan sektor peternakan. Dua sektor tersebut kebanyakan yang terdapat di masyarakat pedesaan.

- e. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Mengoptimalkan aset lokal dengan cara menggali potensi yang ada di suatu daerah tersebut, dijaga dan dilestarikan bahkan dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik. Dengan begitu pendapatan akan meningkat dan aset lokal juga akan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A., & Samani, M. (2021). The Development of Direct-Contextual Learning: A New Model on Higher Education. *International Journal of Higher Education*, 10(2), 15–26. <https://doi.org/doi:10.5430/ijhe.v10n2p15>
- Deptan. (2004). *A. Makna Pendamping Desa*. 12–37.
- Pandangan, deryanto kusuma adi. (2019). Peranan Pendamping Desa Kecamatan Dalam mendampingi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- H Setyawan, W., . R., . N., Budiman, A., . H., Sumarno, A., & Rais, P. (2018). Challenged Solving in Listening Through T-Mobile Learning Model. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.15), 443. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.15.25253>
- Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Desa Prima. (1967). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13–23.
- Runa, I. W. (2013). Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan. *Awal Mula Pembentukan Desa*, 1–24. [http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/304/1/PENGERTIAN DESA.pdf](http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/304/1/PENGERTIAN_DESA.pdf)
- Setianingsih, E. (2019). “Peran Pendampingan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penggerak Ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sambitan Kecamatan Pakel.” 20–39.
- Setyawan, W. H., & Dewi, E. N. (2022). Parental involvement and Educational facilities on Student’s achievement through learning motivation as moderator variable, Is it Effective?. *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.21070/madrosatuna.v6i1.1565>

Penulis

Novi Puji Lestari merupakan seorang dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Lahir di Surabaya 25 November 1986. Tahun 2008 menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Muhammadiyah Malang dengan bidang peminatan Manajemen Keuangan dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi. Pasca Sarjana juga diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Malang dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada tahun 2011. Tahun 2013 menjadi Dosen Muda dalam Bidang Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Minat Riset dari beliau adalah di bidang Manajemen Keuangan, Pengantar Manajemen dan Sistem Informasi.

BAB 9
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(SEBUAH ILUSTRASI)

A. Beberapa Masalah Utama Dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam beberapa masalah utama dalam pengembangan masyarakat ini yang dimaksud dengan:

1. Masalah atau problema adalah perbedaan anatar *das Sollen* (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan yang diharapkan) dengan *das Sein* (yang nyata, yang terjadi). Dengan kata lain masalah adalah perbedaan antara yang *ideal* dengan yang *real*.
2. Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*community of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang bersifat teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa.
3. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, atau upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual, maupun kelompok, dengan cara - cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Galtung, 1980 dalam Trijono, 2007).
4. Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi dan potensi daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Sumodiningrat, 2007).
5. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.
6. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak, dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat (Sukirno, 2011: 3).

7. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno dalam Nelly, 2007).
8. Sumber daya manusia adalah segala potensi yang di miliki manusia baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan (Herry, 2019).
9. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang bukan dibuat oleh manusia dan yang ada di permukaan bumi, baik di darat, di laut maupun di air dan di udara, yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi keperluan manusia, dan organisme lain, atau secara tidak langsung. Dengan demikian sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berupa benda mati dan makhluk hidup yang ada di muka bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memnuhi keperluan manusia (Hastuti, 2021).
10. Kepedulian sosial adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. “Kepedulian Sosial” dalam kehidupan bermasyarakat lebih kental diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. Kepedulian sosial dimulai dari kemauan “memberi” bukan “menerima”.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi hanya apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.
12. Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan (Karyoto, 2020).
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LSM) adalah Lembaga kemasyarakatan desa yang berperan sangat krusial dalam perwujudan pembangunan di desa.

B. Strategi Untuk Menangani Masalah Dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam sejarahnya, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LSM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis. (Priyono, Onny, S, 1996).

Pertama, *the welfare approach*, yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini banyak dilakukan kelompokkelompok keagamaan berupa penyediaan makanan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Pendekatan kemanusiaan walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya tetapi dapat memberdayakan LSM sendiri.

Kedua, *the development approach*, yang dilakukan terutama dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan pengembangan masyarakat dijalankan dengan berbagai program pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.

Ketiga, *the empowerment approach*, yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Clark berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*) yang berkonsentrasi pada pelayanan atau pengadaan proyek pembangunan ke arah sisi permintaan (*demand side*) dengan memberdayakan rakyat, agar rakyat mempunyai posisi tawar menawar agar dapat menjadi pelaku aktif dalam proses pembangunan. Pendekatan pemberdayaan rakyat bertujuan memperkuat posisi tawar - masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela pihak yang lemah.

Dalam aktifitas pengembangan masyarakat, para aktivis sosial perlu memperhatikan pendekatan kedua sebagai jembatan menuju pendekatan ketiga.. Masyarakat lapis bawah dan pinggiran perlu diberdayakan karena mereka masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, partisipasi, ketrampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup (Karyoto, 2020).

Program pengembangan masyarakat pada sisi lain biasanya juga memperhatikan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yakni proses pembangunan, di mana generasi-generasi mendatang memperoleh modal (*capital*) sebanyak atau bahkan lebih dengan apa yang diterima oleh generasi sekarang (Grootaert, Christiaan, 1998: 1). Bagi para pekerja masyarakat, *capital* (modal) yang perlu dijaga kesinambungannya dan dikembangkan meliputi: *natural capital*, *physical capital* (modal fisik), *human capital* (modal manusia) dan *social capital* (modal sosial).

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam prakteknya antara lain diimplementasikan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan atau dikenal dengan teknologi tepat guna yang sebanyak mungkin dalam aktivitas pembangunan. Menyadari hal ini maka salah satu bidang pekerjaan yang menjadi andalan LSM adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan atau tepat guna (*appropriate technology*). Dimensi pekerjaan ini tentu saja memiliki bobot penguasaan kecakapan teknis maupun vokasional amat banyak serta perlu didasari pemahaman secara benar terhadap filosofi teknologi tepat guna.

Oleh karena itu, LSM dianggap telah memberikan respon terhadap problem lingkungan hidup dalam pandangan ekologis jika dalam program-programnya berisi kegiatan adopsi, sosialisasi dan pembudayaan pemakaian teknologi tepat guna ataupun teknologi alternatif (*alternative technologies*) (Ife, Jim, 1997).

Jika kita baca dari perspektif para pencinta lingkungan (*ecological perspective*), teknologi yang dikembangkan harus memiliki hubungan secara positif dengan lingkungan. Hasil teknologi tidak bisa dikatakan “secara inheren baik atau buruk”, namun semuanya tergantung pada bagaimana menggunakannya. Teknologi tidak hanya hadiah dari pembangunan, namun ia sebagai alat untuk pengembangan manusia yang memungkinkannya dapat meningkatkan pendapatan, hidup lebih lama, lebih sehat, menikmati standar hidup lebih baik, berpartisipasi lebih banyak dalam masyarakatnya dan mengarahkan hidupnya lebih kreatif (Brown, Mark, Malloch, 2001, hal. 27).

Teknologi yang dikembangkan manusia haruslah diorientasikan untuk menjaga kesehatan, pertanian dan energi dan untuk mengatasi permasalahan ekologis seperti degradasi kualitas tanah serta munculnya hama dan penyakit. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan membutuhkan dukungan berbagai pihak secara lintas sektor baik dari masyarakat, LSM, pemerintah dan lembaga donor. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan secara selektif. Ia tidak dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain secara sembarangan (Brown, Mark, Malloch, 2001).

Dalam konteks yang luas, keterlibatan LSM dalam pekerjaan kemasyarakatan secara umum berpijak dari tiga visi di atas yaitu menjawab tuntutan kemanusiaan, menjalankan upaya pengembangan masyarakat menuju tercipta kondisi masyarakat yang bisa menolong diri sendiri (*selfhelp*) serta mengarahkan tahapan pengembangan masyarakat menuju tahapan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi concern utama dari setiap aktivis kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat ini setidaknya dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketiga, memberdayakan

rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Daftar Pustaka

- Akmaruzzaman dkk. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah. Volume 5 Nomor 1, Juni.
- Ariyanto, Aris dan Hadion Wijoyo. (2021). Membangun SDM Tangguh di Tengan Gelombang. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. (2013). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handoko, Waluyo. (2013). Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Melalui Program Pengembangan Koperasi Dan Umkm Berbasis Kearifan Lokal. Vol. 1 Nomor 2, hlm. 245-259.
- Hastuti, S. W. M., & Setyawan, W. (2021). Community Service in Study Potential Technology of Education Tour and Business Prospects of Traders in Tulungagung. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–144. <http://www.uniflor.ac.id/e-journal/index.php/mahajana/article/view/952>
- Herry Setyawan, W., Budiman, A., Septa Wihara, D., Setyarini, T., & Nurdyansyah, R. (2019). R., & Barid Nizarudin Wajdi, M.(2019). The effect of an android-based application on T-Mobile learning model to improve students' listening competence. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1175/1/012217/pdf>
- Huraerah, Abu. Pengorganisasian dan Pemngembangan Masyarakat.
- Karyoto, N., Sisbiantoro, D., Setyawan, W. H., & Huda, M. (2020). Effectiveness Legal Formal of Education Culture Heritage at Van Den Bosch Fort in Indonesian. *B-SPACE 2019: Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia*, 434.
- Kuntoro, Sodik A. (1997). Pengembangan Masyarakat Belajar Dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat. *Cakrawala Pendidikan* No. 1 Tahun XVI.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safey. (2001). Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nasdian, Fredian Tonny. (2014). Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Purba, Bonaraja dkk. (2020). Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep Fakta dan Gagasan. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Saptaria, L., & Setyawan, W. H. (2021). Desain Pembelajaran Technopreneurship Untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Uniska Kediri. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 77–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37478/jpm.v2i1.880>
- Trisnawati, Aditya Eka dkk. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Volume: 3 Nomor: 1 Bulan Januari.

Penulis



Agus Setyowidodo, lahir di Kebumen pada 31 Agustus 1975 dan sekarang menetap di Surakarta. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Nebumen lulus tahun 1990, dan SMA Negeri 1 Kebumen lulus padageri 1 Alian, Kebumen, pada lulus tahun 1988, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Ke tahun 1993. Kemudian melanjutkan Strata 1 di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, lulus tahun 1998. Setelah lulus berkarier di Perbankan pada salah satu Bank Umum Swasta Nasional dan pada tahun 2018 meniti karier sebagai Akademisi sebagai Pengajar Praktisi. Melanjutkan studi Strata dua di Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta, mengambil konsentrasi Magister Manajemen.

Saat ini sebagai Pengajar di Universitas Mahakarya Asia (UNMAHA) Yogyakarta. Juga sebagai Pengajar LB di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan STIA “AAN” Yogyakarta, serta menjadi Instruktur/Fasilitator pada Pelatihan Perbankan dan Pendidikan Latihan (DIKLAT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta.

Penulis bisa dihubungi melalui

Email: : astyo318@gmail.com

LinkedIn : www.linkedin.com/in/agus-setyowidodo

